

**PENGARUH PDRB, TINGKAT PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN
PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP KEMISKINAN
DI PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2013-2017**

SKRIPSI



Disusun oleh

Muhammad Prayoga Nugraha

15313243

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2019

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH PDRB, TINGKAT PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERTUMBUHAN
PENDUDUK TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2017**

Disusun Oleh : **MUHAMMAD PRAYOGA NUGRAHA**

Nomor Mahasiswa : **15313243**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Kamis, tanggal: 7 Februari 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Heri Sudarsono, SE.,MEc

Penguji : Nur Feriyanto, Dr., M.Si



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

PENGESAHAN

Pengaruh PDRB, Tingkat Pendidikan, Kesehatan, Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap
Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017

Nama : Muhammad Prayoga Nugraha

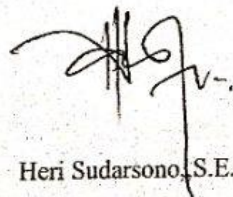
Nomor Mahasiswa : 15313243

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, *14 Januari* 2019

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen pembimbing,




Heri Sudarsono, S.E., M.Ec.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/ sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Januari 2019

Penulis,


Muhammad Prayoga Nugraha

**Pengaruh PDRB, Tingkat Pendidikan, Kesehatan Dan Pertumbuhan
Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1

Program Studi Ilmu Ekonomi,

pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama: Muhammad Prayoga Nugraha

Nomor mahasiswa: 15313243

Program Studi: Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

2019



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas limpahan rahmat dan ridho Allah SWT, skripsi

ini saya persembahkan untuk:

Orang terhebat dalam hidup, Papah dan Mamah.

Keluarga tersayang.

Sahabat dan semua pihak yang telah menemani berjuang sejauh ini.

Almamaterku Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh PDRB, Pendidikan, Jumlah Penduduk, dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017”**. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh ummatnya.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata I Program Studi Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang dalam kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, pihak-pihak tersebut adalah:

1. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Dr Sahabudin Sidiq, MA, selaku Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Heri Sudarsono, SE., M.Ec, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa sabar mengarahkan dan membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengalaman pengetahuannya kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Seluruh pegawai dan staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
7. Keluarga tercinta Papah, Mamah, Nafa dan Jeril yang telah menjadi inspirasi, sumber motivasi terbesar dalam hidup penulis serta dengan tulus dan ikhlas memberikan dukungan dan doa hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar Pondok Pesantren Mahasiswa Jogja.
9. Crocodile Squad yang telah menemani berjuang sejauh ini.
10. Panitia JIP 2018 yang memberikan kesan dan cinta mengurus muda-mudi yang super mengurus kesabaran.
11. Teman-teman angkatan 2015 Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
12. Teman-teman KMM Desa Gondokusuman
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir serta dalam menempuh studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 15 Februari 2019
Penyusun

Muhammad Prayoga N

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB, pendidikan, jumlah penduduk dan kesehatan terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2013-2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat analisis panel data, yang terdiri dari data times series selama periode 2013-2017 dan data cross section 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Panel data dengan model Fixed Effect digunakan sebagai teknik analisis dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan di Jawa Barat mampu dijelaskan oleh variabel PDRB, pendidikan, jumlah penduduk, dan kesehatan sebesar 99,12% (R^2). Selanjutnya secara parsial koefisien regresi menunjukkan (1) PDRB berpengaruh positif dan tidak signifikan dengan koefisien sebesar 0.007102 dan probabilitas 0.7627, (2) pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien sebesar -0.082942 dan probabilitas 0.0000, (3) jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien sebesar -0.015839 dan probabilitas 0.0081, (4) kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien sebesar -0.853996 dan probabilitas 0.0315.

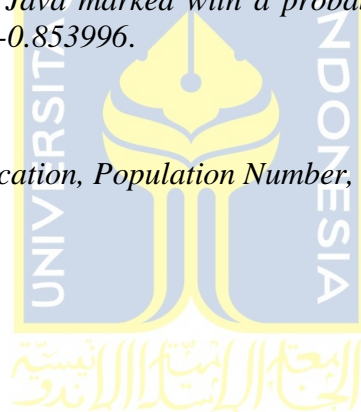
Kata kunci: Kemiskinan, PDRB, Pendidikan, Jumlah Penduduk, Kesehatan, Model *Fixed Effect*.



ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Gross Domestic Regional Product (GDRP), education, population number, and health in West Java Province 2011-2015. This study uses secondary data analysis tool data panel, consisting of time series data over the period 2011-2015 and cross section 27 districts/cities in West Java. Panel data with Fixed Effect Model is used as an analytical technique in this study. The result showed that poverty in West Java able to be explained by GDRP, education, population number, and health to 99,12% (R^2). Furthermore, the partial regression coefficient indicates (1) a significant effect of GDRP 5% significance level with a probability value of 0.7627 and positively related to the value obtained for the coefficient of 0.007102, (2) education variabel is significant and negatively related to the poverty in West Java marked with a probability value of 0.0000 and the coefficient obtained by -0.082942, (3) population number is significant and negatively related to the poverty in West Java marked with a probability value of 0.0081 and the coefficient obtained by -0.015839, (4) health is significant and negatively related to the poverty in West Java marked with a probability value of 0.0315 and the coefficient obtained by -0.853996.

Keywords: GDRP, Education, Population Number, Health, Fixed Effect Model



DAFTAR ISI

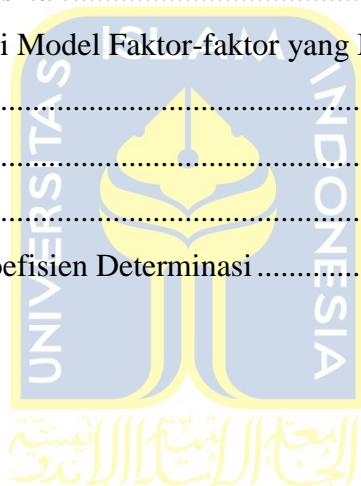
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN UJIAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	xiii
INTISARI.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xixx
DAFTAR GRAFIK.....	xxx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxixi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1.4 Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
2.1 Telaah Pustaka.....	14
2.2 Landasan Teori	21
2.3 Kerangka Pikir.....	41
2.4 Pengembangan Hipotesis	41

BAB III METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Jenis dan Sumber Data	44
3.2 Objek Penelitian	44
3.3 Populasi dan Sampel	44
3.4 Definisi Operasional Variabel	45
3.5 Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	51
4.2 Pemilihan Model Data Panel	61
4.3 Pengujian Hipotesis	64
4.4 Pembahasan	68
BAB V PENUTUP.....	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran	77
LAMPIRAN	83



DAFTAR TABEL

Tabel 1.4 PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Jawa Barat	8
Tabel 2.1 Telaah Pustaka	22
Tabel 4.1 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat	69
Tabel 4.2 Laju PDRB atas Dasar Harga Konstan	71
Tabel 4.3 Angka Partisipasi Murni Tingkat Sekolah Menengah Atas.....	73
Tabel 4.4 Laju Pertumbuhan Penduduk	75
Tabel 4.5 Angka Harapan Hidup	78
Tabel 4.6 Hasil Uji <i>Likelihood</i>	79
Tabel 4.7 Hasil Uji <i>Hausman</i>	81
Tabel 4.8 Hasil Estimasi Model Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan.....	82
Tabel 4.9 Hasil Uji T.....	84
Tabel 4.10 Hasil Uji F.....	86
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi	87



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Persentase Tingkat Kemiskinan di Indonesia 2012-2017.....	4
Grafik 1.2 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi-provinsi di Pulau Jawa 2017	
5	
Grafik 1.3 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat 2012-2017...	6
Grafik 1.4 Angka Partisipasi Murni di Provinsi Jawa Barat 2012-2017	9
Grafik 1.5 Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Barat 2011-2017	11
Grafik 1.6 Angka Harapan Hidup di Provinsi Jawa Barat 2012-2017.....	12



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 <i>Output Pooled Least Square (PLS)</i>	81
Lampiran 2 <i>Output Fixed Effect Model (FEM)</i>	82
Lampiran 3 <i>Output Random Effect Model (REM)</i>	83
Lampiran 4 <i>Chow Test</i>	84
Lampiran 5 <i>Hausman Test</i>	85



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan dari kemerdekaan Indonesia berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-empat salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum identik dengan masalah ekonomi dan kemiskinan yang saat ini kondisi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan dua bagian yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan. Dikatakan demikian karena pertumbuhan ekonomi yang dirasakan tidak mampu menyebar merata pada setiap daerah di Indonesia sehingga kemiskinan lebih terpusat terutama di daerah-daerah tertentu saja. Menurut Ritonga (2003) kemiskinan merupakan keadaan Individu atau keluarga yang serba kekurangan dan tidak mampu memenuhi penghidupan yang laik (layak dan baik). Komponen kebutuhan dasar diantaranya tersedianya atau tercukupinya sandang, pangan, tempat tinggal dan kebutuhan sosial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Segi aspek primer mengelompokkan masyarakat bermacam macam diantaranya miskin asset, wawasan organisasi, sosial politik, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Sedangkan dari aspek sekunder diantaranya minimnya sumber keuangan, informasi serta jaringan sosial. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan masyarakat miskin adalah masyarakat yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah angka garis kemiskinan. tolak ukur menetapkan garis kemiskinan yang dialami masyarakat Indonesia adalah individu atau sekelompok yang berpenghasilan dibawah Rp.7.057 per hari. Untuk

menentukan garis kemiskinan makanan (GKM) mengkategorikan jumlah kalori per hari yang diperoleh dalam asupan makanan sebesar 2.100 kalori. Seiring dengan perubahan zaman, pada kenyataannya kemiskinan yang terjadi tidak hanya merupakan persoalan penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya yang dilihat dari pemenuhan dasar berupa makanan maupun non makanan.

Masalah kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang berhubungan banyak aspek. dan efek yang ditimbulkan dari kemiskinan begitu kompleks, diantaranya pengangguran, kerusuhan dan kejahatan. Dikatakan demikian karena sebagian besar masyarakat miskin (*the poor*) biasanya tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) yang lebih diakibatkan minimnya lapangan pekerjaan dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Akibatnya keamanan suatu daerah akan terganggu karena banyak terjadi kejahatan, kesehatan masyarakat juga akan menurun karena akses masyarakat terhadap layanan kesehatan juga berkurang, karena tidak terjangkau biaya kesehatan. Artinya dampak dari kemiskinan tersebut lebih dominan pada aspek sosial yang dapat mempengaruhi pembangunan suatu negara. Dengan demikian, memberantas permasalahan yang menjangkit masyarakat miskin tidak hanya melalui satu atau dua faktor saja, dan dilakukan secara parsial saja, akan tetapi pendekatannya harus dilakukan secara sinergi untuk tercapainya tujuan (Susanty, 2013).

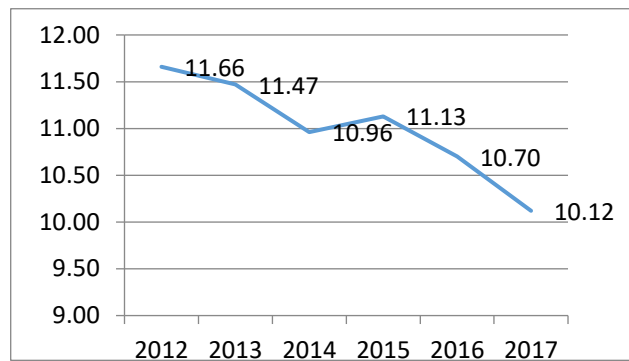
Guna mengetahui dampak program pemerintah terhadap penurunan kemiskinan, awalnya, dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi lebih didasarkan pada tingkat pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto). Harapannya dengan PDB yang meningkat mampu memberikan hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial

secara merata (Todaro, 2000). Oleh karena itu, PDB banyak mengalami kritikan dan menganggap bahwa PDB bukan salah satu indikator penting membangun ekonomi negara, sebab hingga sekarang masalah kemiskinan belum juga terselesaikan. Salah satunya adalah pandangan dari Todaro (2000) yang mengatakan bahwa dalam konteks pembangunan ekonomi tidak hanya tentang pertumbuhan PDB saja, akan tetapi penanggulangan ketimpangan pendapatan, penyediaan lapangan kerja dan juga pengentasan kemiskinan yang terus mengalami perkembangan. Artinya kemiskinan merupakan persoalan rumit yang harus dituntaskan untuk terciptanya pembangunan negara yang berkeadilan sosial. Saat ini perekonomian yang berhasil tidak hanya diukur lewat PDB yang meningkat, tetapi juga dengan pengentasan kemiskinan. Hal ini didasarkan pendapat dari Sukirno (2005) yang mengatakan bahwa dalam makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu masalah yang timbul dalam jangka panjang.

Progress penurunan kemiskinan selama masa transisi dari orde baru, ke orde lama sempat mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan berbagai macam upaya pemerintah begitu agresif melalui program pembangunan nasional, transmigrasi dan lain sebagainya. tetapi mulai pada awal tahun 1998 Indonesia mengalami krisis moneter yang berdampak pada krisis multidimensial hingga menjadikan keterpurukan yang tidak dapat ditangani oleh pemerintah secara maksimal (Hudaya, 2009). Semenjak era reformasi pemerintah giat melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan. Hasilnya, di tahun 2012 sampai dengan tahun

2017 tingkat kecenderungan kemiskinan mengalami penurunan. Berikut tabel persentase tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2012-2017.

Grafik 1.1
Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012-2017 (Persen)

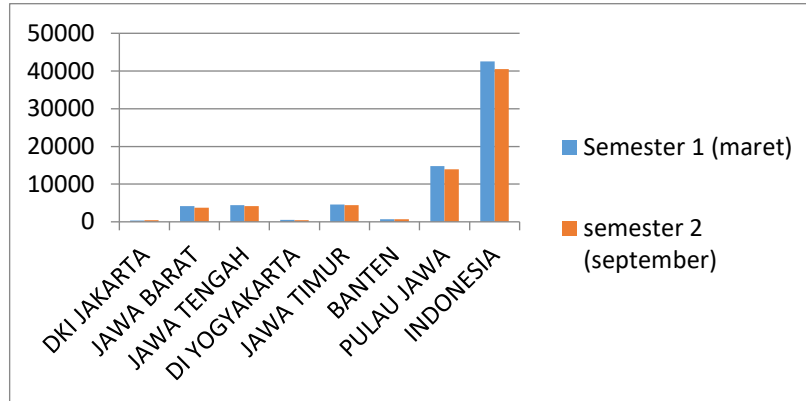


Sumber: Badan Pusat Statistik (2018), diolah.

Berdasarkan grafik 1.1, menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia pada kurun waktu 2012 hingga tahun 2017 mengalami kecenderungan linearitas yang menurun, walaupun dalam 4 tahun terakhir mengalami anomali pada tahun 2015 sebesar 11.15 kemudian turun menjadi 10,12 persen pada tahun 2017.

Dari 34 provinsi di Indonesia, pembangunan ekonomi banyak disumbangkan di pulau Jawa dan sekitarnya, akan tetapi ternyata timbul permasalahan kemiskinan yang malah terkonsentrasi khususnya di pulau Jawa meliputi Provinsi Jawa Barat, Jawa tengah dan Jawa Timur.

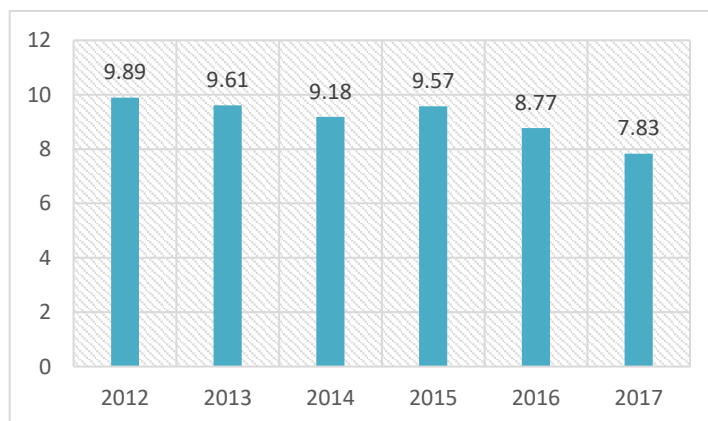
Grafik 1.2
Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2017 (Ribu Jiwa)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2018), diolah.

Dari grafik 1.2 menunjukkan bahwa tingginya penduduk miskin di tiga Provinsi. Jawa barat berada di urutan ketiga sedangkan Jawa Timur dan Tengah berada satu tingkat di atasnya. Provinsi Jawa Timur memiliki penduduk miskin dengan jumlah 4.775.990 jiwa. sementara Jawa tengah memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 4.505.780 jiwa.

Grafik 1.3
Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2017 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2018), diolah.

Berdasarkan grafik 1.3 menunjukkan dari tahun 2012 hingga 2017 tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan fluktuatif cenderung menurun. Terjadi kenaikan pada tahun 2015 sebesar 9.57% namun di tahun berikutnya 2016 hingga 2017 kembali menurun.

Presentase yang cenderung menurun menunjukkan keberhasilan *stakeholders* menjalankan program pembangunan dalam pengentasan kemiskinan di Jawa Barat, hal ini diiringi dengan peningkatan PDRB di Jawa barat yang menyebabkan terjadinya penurunan tingkat kemiskinan.

PDRB dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dari kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Thamrin, 2001). Hal ini dikarenakan komoditi produk dalam PDRB menunjukkan tingkat pendapatan seseorang yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan individu. Artinya semakin tinggi tingkat PDRB maka semakin baik pula pemenuhan kebutuhan seseorang, namun sebaliknya semakin rendah tingkat PDRB maka semakin rendah pula tingkat pemenuhan kebutuhan seseorang.

Berikut adalah rincian PDRB di Jawa Barat atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2012-2017.

Tabel 1.4
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2017

Tahun	PDRB	Laju PDRB (%)
2012	Rp 1,028,409,740.00	6.5
2013	Rp 1,093,543,546.00	6.33
2014	Rp 1,149,216,058.00	5.09
2015	Rp 1,207,232,342.00	5.05
2016	Rp 1,275.546.477,15	5.67
2017	Rp 1,342.953.376,17	5.29

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018), diolah.

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan nilai PDRB Jawa Barat terus mengalami kenaikan dari Rp 1,028,409,740.00 pada tahun 2012, meningkat hingga Rp1,342,953,376.17 juta rupiah pada tahun 2017. Sementara jika dilihat dari lajunya, PDRB Jawa Barat tampak menurun, pada tahun 2012 sebesar 6.5% hingga pada tahun 2017 angka sebesar 5.29% .

Sama halnya PDRB, peningkatan kualitas pendidikan juga diharapkan mampu mengubah tingkat kemiskinan. Hal ini dikarenakan dengan adanya pendidikan maka kualitas sumber daya manusia, wawasan dan juga ketrampilann dapat digunakan sebagai modal dalam bekerja dan berwirausaha. Adapun dalam pengukuran indikator pendidikan digunakanlah Indikator angka partisipasi murni (APM).

Indikator angka partisipasi murni (APM) menjadi indikator pendidikan yang diamati dalam penelitian ini. Menurut BPS, Angka Partisipasi Murni merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM digunakan untuk menguji tentang kemampuan sistem kurikulum, pemanfaatan sarana dan

prasarana pendidikan terhadap penduduk yang mengenyam bangku usia sekolah. APM diharapkan mampu menjangkau masyarakat sesuai jenjang pendidikannya. Jika $APM = 100$, maka semua anak usia sekolah menempuh jenjang pendidikannya sesuai dengan waktu yang seharusnya. Dalam penelitian ini penyusun mengambil APM kelompok jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Guna memberikan gambaran terhadap tingkat pendidikan di Jawa Barat, berikut ini disajikan grafik APM Sekolah Menengah Atas Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2017 dalam persen

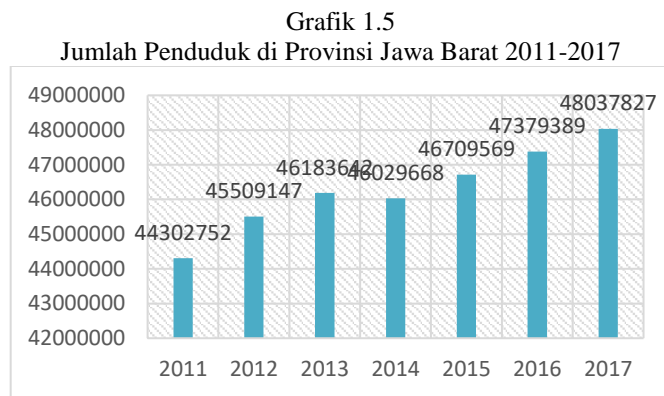


Sumber: Badan Pusat Statistik (2018), diolah.

Berdasarkan grafik 1.4 dapat dikatakan bahawa indikator pendidikan yang diukur APM terjadi fluktuatif dari tahun 2012 jumlah APM sebesar 49,38% turun di tahun 2013 sebesar 40,58% tahun 2014 turun menjadi 40,31%. Baru ditahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 55,58%.

Indikator PDRB dan angka partisipasi murni (APM) yang baik, bukanlah penentu akhir dari permasalahan ekonomi. Hal ini dikarenakan, kerumitan yang terjadi di dalam permasalahan pembangunan juga dipengaruhi oleh jumlah

penduduk. Dikatakan demikian karena, semakin banyak jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan kualitas hidup akan menjadi persoalan dikemudian hari. Oleh karena itu, langkah penting yang perlu dilakukan adalah dengan mengurangi laju pertumbuhan penduduk (Sukirno, 2006). Berikut ini adalah grafik Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Barat 2011-2017




Sumber: Badan Pusat Statistik (2018), diolah.

Berdasarkan grafik 1.5 menunjukkan jumlah penduduk Jawa Barat tahun 2011 hingga 2017 cenderung mengalami kenaikan, walaupun ada beberapa tahun yang mengalami penurunan namun tidak signifikan. Rinciannya, tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 460.296 jiwa, sedangkan dari tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan hingga 480.378 jiwa.

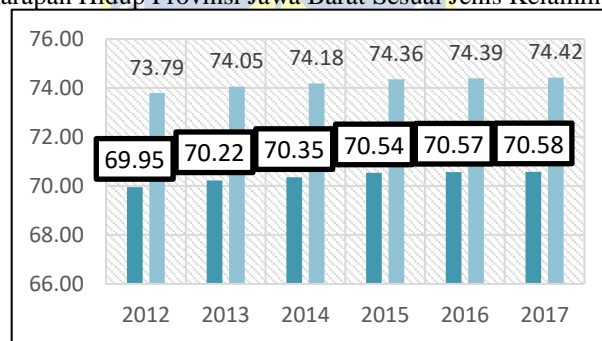
Penekanan laju pertumbuhan penduduk juga harus diimbangi dengan perbaikan kesehatan pula. Hal ini dikarenakan penekanan laju pertumbuhan dan kesehatan harus bersinergi agar memberikan suatu harapan bagi masyarakat di Indonesia menuju masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing. Dengan demikian, pembangunan kesehatan merupakan investasi penting yang perlu digerakkan oleh suatu negara.

Pengontrolan terhadap derajat kesehatan adalah dengan melalui Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup dapat digunakan untuk memberikan informasi kriteria umur rata-rata yang dicapai individu di lingkungan masyarakatnya. Daerah yang menunjukkan kesehatannya rendah maka AHH juga akan rendah pula sebaliknya bila semakin tinggi AHH maka menunjukkan adanya indikasi keberhasilan daerah dalam membangun kesehatan masyarakatnya. Adapun angka harapan hidup Provinsi Jawa Barat Sesuai Jenis Kelamin 2012-2017 ditunjukkan pada tabel berikut ini:



 Grafik 1.6

 Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Barat Sesuai Jenis Kelamin 2012-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik (2018), diolah.

Grafik 1.6 menggambarkan angka harapan hidup di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2012 hingga 2017 meningkat baik itu jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Dalam penyajian ini maka adanya indikasi kinerja “baik” yang dilakukan Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2017.

Berdasarkan beberapa penjelasan dan data yang dilampirkan, penulis merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB, pendidikan, jumlah penduduk, dan kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat periode tahun 2013-2017.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017?
3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017?
4. Bagaimana pengaruh kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017?
5. Bagaimana hubungan PDRB, pendidikan, jumlah penduduk, dan kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017.
2. Mengidentifikasi Pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017.
3. Mengidentifikasi Pengaruh kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017

4. Mengidentifikasi Pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017.
5. mengidentifikasi Pengaruh PDRB, jumlah penduduk, kesehatan, dan pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menimbulkan dampak yang positif baik dari aspek teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat:

- 1) Memberikan tambahan wacana, informasi, dan kajian tentang kemiskinan di Jawa Barat.
- 2) Sebagai tambahan bahan referensi dan pengetahuan bagi mahasiswa atau pihak lain yang menginginkan untuk melakukan penelitian yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi mengenai penyebab kemiskinan di Jawa Barat dilihat dari indicator-indikator PDRB, jumlah penduduk, kesehatan dan pendidikan sehingga diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menyusun kebijakan dalam pengurangan kemiskinan di Jawa Barat.

1.4 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini dimulai dari uraian latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta telaah pustaka.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini merupakan landasan teori yang relevan sebagai dasar yang digunakan dalam penyusunan penelitian dan juga kerangka pikir.

BAB III : Metode Penelitian

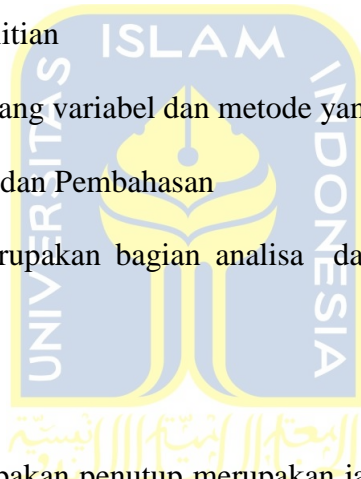
Bab ini berisi tentang variabel dan metode yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: Analisis Data dan Pembahasan

Bab keempat merupakan bagian analisa dari data yang diperoleh serta pembahasannya.

BAB V: Penutup

Bab kelima merupakan penutup merupakan jawaban dari rumusan masalah. Selain berupa kesimpulan, bagian penutup juga memberikan saran bagi pihak-pihak terkait.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Telaah Pustaka

Permasalahan kemiskinan yang begitu kompleks menyebabkan banyak peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kemiskinan. Guna memperkuat penelitian yang dilakukan oleh penulis maka, penulis menjadikan beberapa penelitian sebelumnya sebagai dasar dalam melakukan penelitian ini. Adapun penelitian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian Permana dan Arianti (2012) yang dilakukan terhadap data BPS secara *time series* dengan metode *cross section* pada tahun 2004 sampai dengan 2009 membuktikan bahwa pertumbuhan PDRB, pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan ($\alpha=5\%$) terhadap kemiskinan, sebaliknya variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan ($\alpha=5\%$) terhadap kemiskinan.

Mahsunah (2013) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh variabel dependen berupa kemiskinan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan uji regresi berganda. Hasilnya seluruh variabel independent yaitu jumlah penduduk, pendidikan, pengangguran secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan secara parsial hanya variabel pengangguran yang berpengaruh secara signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wirawan dan Arka (2017) dengan menggunakan regresi linier berganda menyimpulkan bahwa variabel Pendidikan (X1), PRDB per Kapita (X2), Tingkat Pengangguran (X3) secara bersamaan

berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, namun secara parsial Pendidikan, PDB perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, sedangkan tingkat pengangguran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

Penelitian yang dilakukan oleh Suliswanto (2010) dengan metode data panel dengan menggunakan *fixed* dan *random effect* menyimpulkan kemiskinan, PDRB, IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan (Y1)

Penelitian dari Suprianto, dkk (2017) yang melakukan penelitian terhadap kemiskinan dengan regresi linier berganda mengatakan bahwa Penduduk (X1), Tingkat Pendidikan (X2) Kesehatan (X3) secara parsial seluruh variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan sedangkan secara bersama sama berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian Pattimahu (2016) dengan regresi panel data mengatakan bahwa variabel penduduk dan pengangguran secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan. Penelitian dari Duwila (2016) dengan menggunakan regresi berganda *Pooled Least Square (PLS)* mengatakan bahwa Pendidikan (X1) Pengangguran (X2), Inflasi (X3) Secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Secara parsial hanya variabel pengangguran yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan dua variabel lain berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Ridzky Giovanni (2018) mengatakan bahwa dengan menggunakan metode *Panel Least Square (PLS)*, dengan menggunakan data panel ada dengan pendekatan *common effect model*, *fixed effect model*, *random effect model*.

Menyimpulkan variabel pengangguran (X1) tidak signifikan terhadap Kemiskinan (Y1). Variabel pendidikan (X2) tidak signifikan terhadap Kemiskinan (Y1). Variabel PDRB (X3) signifikan terhadap Kemiskinan (Y1).

Penelitian dari Gunanto (2013) dengan regresi linier berganda dengan *Fixed Effect Model* (FEM) variabel Pengangguran dan inflasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan sedangkan PDRB berpengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian dari Ni Made Myanti Astrini A & Ida Bagus Putu Purbadharmaja (2013) mengatakan bahwa Secara simultan seluruh variabel berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan secara parsial PDRB dan pendidikan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. pengangguran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan.

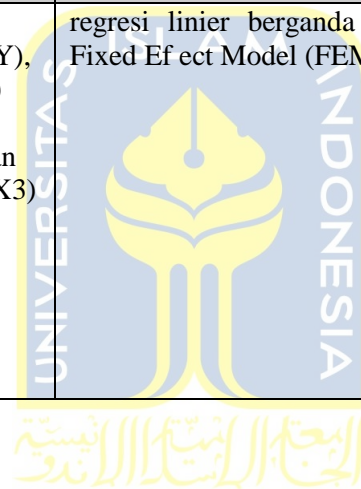
Susanti (2013) melakukan penelitian mengenai kemiskinan di Jawa Barat menggunakan analisis regresi linier panel data dengan data panel pada tahun 2009-2011. Hasilnya baik secara parsial maupun simultan PDRB dan pengangguran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan di daerah Jawa Barat.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No .	Penulis & Tahun	Jenis Referensi	Variabel	Alat Analisis	Ringkasan Hasil
1.	Permana dan Arianti (2012)	Jurnal	Tingkat kemiskinan (Y), pertumbuhan PDRB (X1), tingkat pengangguran (X2), pendidikan (X3), kesehatan (X4), serta dummy wilayah (X5)	Menggunakan data time series dari tahun 2004-2009. dengan analisis data panel,	Hasil penelitiannya bahwa seluruh variabel baik PDRB (X1), Pendidikan (X3), dan Kesehatan (X4) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan (Y1). Sedangkan, Pengangguran (X4) dan dummy wilayah (X5) berpengaruh positif dan signifikan pada Kemiskinan.
2	Mahsunah (2013)	Jurnal	Kemiskinan, Jumlah Penduduk, Pendidikan, Pengangguran	Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan uji regresi berganda	Secara simultan seluruh variabel independent berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan secara parsial hanya variabel pengangguran yang berpengaruh secara signifikan.
3.	Wirawan dan Arka (2017)	Jurnal	Jumlah Penduduk Miskin (Y), Pendidikan (X1), PRDB per Kapita (X2), Tingkat Pengangguran (X3)	Regresi Linier Berganda	seluruh variabel secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. secara parsial Pendidikan, PDB perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, sedangkan tingkat pengangguran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin

4	Suliswanto (2010)	Jurnal	Kemiskinan, PDRB, IPM	Metode Data Panel pendekatan <i>fixed dan random effect</i>	bahwa variabel PDRB (X1) dan IPM (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Kemiskinan (Y1)
5.	Suprianto, dkk (2017))	Jurnal	Penduduk, Tingkat Pendidikan, Kesehatan, tingkat Kemiskinan	regresi linier berganda	secara parsial seluruh variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan sedangkan secara bersama sama berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
6.	Pattimahu (2016)	Jurnal	Kemiskinan (Y), Penduduk (X1), Pengangguran (X2)	Regresi Panel Data	Seluruh variabel secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan
7.	Duwila (2016)	Jurnal	Pendidikan (X1), Pengangguran(X2), Inflasi (X3) dan Kemiskinan (Y)	regresi berganda Pooled Least Square (PLS)	Secara Bersama-sama seluruh variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Secara parsial hanya variabel pengangguran yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan dua variabel lain berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

8.	Ridzky Giovanni (2018)	Jurnal	PDRB, Pengangguran, Pendidikan, Kemiskinan	Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode Panel Least Square (PLS), dengan menggunakan tiga model pendekatan yaitu <i>common effect</i> , <i>fixed effect</i> , dan <i>random effect</i>	Variabel pengangguran (X1) tidak signifikan terhadap Kemiskinan (Y1). Variabel pendidikan (X2) tidak signifikan terhadap Kemiskinan (Y1). Variabel PDRB (X3) signifikan terhadap Kemiskinan (Y1).
9.	Gunanto (2013)	Jurnal	Jumlah Kemiskinan (Y), PDRB (X1) Jumlah Pengangguran (X2), Inflasi (X3)	regresi linier berganda dengan Fixed Effect Model (FEM)	Pengangguran dan inflasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan sedangkan PDRB berpengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan



10.	Astrini &Purbadharmaja (2013)	Jurnal	Kemiskinan, PDRB, Pendidikan, Pengangguran	regresi berganda	Secara simultan seluruh variabel berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan secara parsial PDRB dan pendidikan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. pengangguran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan
11.	Susanti (2013)	Jurnal	PDRB, Pengangguran, IPM, Kemiskinan	regresi linier panel data	Menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan PDRB (x1), Pengangguran (X2) terhadap kemiskinan. Sebaliknya IPM (X3) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas dapat dikatakan bahwa dalam penanggulangan kemiskinan masih diperlukan strategi penyusunan. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independen, objek dan periode yang digunakan. Variabel dependen berupa tingkat kemiskinan dengan variabel independent berupa PDRB (indikator berupa pembangunan di bidang ekonomi), pendidikan (indikator berupa angka partisipasi murni (APM)), Jumlah penduduk (indikator berupa jumlah pertumbuhan penduduk), dan kesehatan (indikator berupa Angka Harapan Hidup (AHH)). Objek penelitian yang diteliti adalah Provinsi Jawa Barat dengan periode mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kemiskinan

2.2.1.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan ketidakmampuan seseorang di dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal berupa kebutuhan pokok (sandang, papan, dan pangan). Individu atau sekelompok rumah tangga dikategorikan miskin jika dalam pemenuhan kebutuhan semisal pendapatan dan atau kebutuhan barang dan jasa lebih rendah bila dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya (Suharto, 2009).

Permasalahan kemiskinan pada negara berkembang semisal Indonesia sulit terhindarkan. Sebab di dalam kemiskinan yang multidimensional manusia membutuhkan banyak sekali keperluan hingga memerlukan aspek baik itu dari segi primer (miskin aset, wawasan organisasi, sosial, politik, dan IPTEK) serta

sekunder (jaringan sosial, perolehan pendapatan dan informasi). Wujud dari dimensi kemiskinan meliputi kurangnya asupan gizi, air, lingkungan yang sehat, kebutuhan kesehatan, dan pendidikan (Arsyad, 2010: 244).

2.2.1.2 Penyebab Kemiskinan

Menurut Kuncoro (2006) Sisi ekonomi memandang kemiskinan berdasarkan tiga persoalan, diantaranya:

1. Dipandang dari sisi mikroekonomi masyarakat miskin memiliki keterbatasan sumber daya dan rendahnya kualitas. Selain itu, ketimpangan pendapatan menjadikan kepemilikan sumber daya itu tidak sama.
2. Produktivitas yang rendah dikarenakan pengetahuan dan kualitas yang rendah sehingga penghasilan yang diperoleh pun juga akan rendah.
3. Permodalan yang sulit menjadikan masyarakat miskin sulit mengakses pendanaan

Arsyad (2010) mengatakan bahwa sumber daya yang ada pada suatu Negara dikelola memiliki tujuan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Adanya persoalan ketimpangan lebih dikarenakan pada kondisi yang beragam dan keadaan ekonomi di negara tersebut juga masih rendah, maka terkadang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemangku kebijakan hanya bersifat jangka pendek. Di sisi lain, kebijakan dalam negeri terkadang tidak dapat lepas dari bayang-bayang kondisi keadaan luar negeri yang secara tidak langsung berpengaruh besar dalam pendapatan suatu Negara.

Kemiskinan berdampak pada kesulitan dalam mengakses faktor produksi yang berkualitas sehingga secara langsung program pembangunan yang dilakukan

oleh pemerintah kurang dapat dirasakan manfaatnya. Beberapa kendala yang dialami dalam proses pembangunan diantaranya terjadi secara alamiah maupun secara tidak alamiah. Artinya, permasalahan kemiskinan lebih bersifat kompleks dan ketidak mampuan masyarakatnya dalam menghadapi cepatnya perubahan yang terjadi.

2.2.1.3 Jenis Kemiskinan

Jenis kemiskinan menurut Khomsan (2016) terbagi menjadi empat jenis, diantaranya:

1. Kemiskinan Absolut

Dikatakan kemiskinan absolut apabila hasil pendapatan yang diperoleh secara umum berada di bawah garis kemiskinan dan kesulitannya memenuhi kebutuhan dasar hidup, semisal pangan, papan, kesehatan, sandang dan juga pendidikan.

2. Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif sebab keadaan miskin yang dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau masyarakat luas yang kurang mampu, sehingga mengakibatkan ketimpangan pendapatan atau singkatnya seseorang tersebut tetap dalam keadaan di bawah kemampuan.

3. Kemiskinan Kultural

Seseorang termasuk golongan miskin kultural disebabkan tidak adanya kemampuan untuk usaha memperbaiki kehidupan yang baik walaupun memperoleh bantuan dari pihak luar.

4. Kemiskinan Struktural

Seseorang yang termasuk dalam kemiskinan structural lebih disebabkan dengan kesulitannya mengakses di dalam sistem sosial budaya dan politik untuk terbebas dari masalah kemiskinan.

1) Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan secara global dapat digunakan sebagai dasar pengelompokan negara maju atau berkembang dikatakan demikian karena dalam ukuran kemiskinan merupakan kemampuan masyarakat terhadap standar hidup minimum atau lebih dikenal dengan garis kemiskinan. Artinya semakin sedikit masyarakat di suatu negara yang berada di garis kemiskinan maka dapat dikatakan negara tersebut merupakan negara maju, begitu pula sebaliknya semakin banyak masyarakat yang berada di bawah kemiskinan maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara berkembang. Artinya dengan diketahuinya garis kemiskinan maka *stakeholder* dapat menyusun strategi yang tepat untuk menanggulangi kemiskinan (Wikipedia).

Ukuran masyarakat dikatakan miskin menurut BPS adalah bila pengeluaran masyarakat per kapita perbulan di bawah Rp 7.057 per hari dengan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) sebesar 2.100 kalori sedangkan di lihat dari garis kemiskinan non makanan melalui ukuran sulit tidaknya masyarakat dalam memperoleh hunian yang layak, akses Pendidikan 9 tahun dan kesehatan (Mudrajad: 2006)

2.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2.2.2.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan jumlah dari keseluruhan nilai tambah dari semua unit usaha dalam suatu wilayah atau jumlah seluruh nilai akhir baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dari suatu wilayah (BPS, 2018). Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah maka semakin tinggi pula PDRB yang dihasilkan.

Tarigan (2008) memformulasikan tiga pendekatan untuk memperhitungkan PDRB, diantaranya:

1. Pendekatan Produksi

PDRB dengan pendekatan ini dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh nilai tambah baik berupa barang maupun jasa dalam unit ekonomi di daerah tersebut dikurangi dengan biaya produksi bruto (*sector/non sector*) dalam kurun waktu biasanya 1 tahun. Dalam pendekatan ini unit produksi dikelompokkan dalam 9 jenis usaha yaitu: 1) pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, 2) pertambangan, 3) industri pengolahan, 4) listrik, gas dan air bersih, 5) konstruksi, 6) hotel dan restoran, 7) pengangkutan dan komunikasi, 8) real estate, 9) jasa-jasa.

Untuk merumuskan PDRB, dengan cara sebagai berikut:

$$Y = (P_1 \times C_1) + (P_2 \times C_2) + (P_n \times C_n) \quad (2.1)$$

Keterangan:

Y= Pendapatan nasional

P₁= harga barang ke-1

C₁= jenis barang ke-1

P_n= harga barang ke-n

C_n= jenis barang ke-n

2. Pendekatan Pendapatan

PRDB dengan menggunakan pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung seluruh nilai tambah ekonomi berupa faktor produksi berupa gaji upah, surplus, dan pajak tidak langsung (netto) dalam kurun waktu 1 tahun. Dengan menggunakan pendekatan pendapatan maka pendapatan dari masing-masing faktor produksi akan mengalami perbedaan. Diantaranya 1) tenaga kerja=gaji/upah, 2) pemilik modal=bunga, 3) tuan tanah=sewa, dan 4) bakat atau keahlian=laba. Rumus pendekatan pendapatan adalah:

$$Y = r + w + i + p \quad (2.2)$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional

R = Pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya

W = Pendapatan bersih dari sewa

I = Pendapatan dari bunga

P = Pendapatan berupa laba dari perusahaan dan usaha perorangan

3. Pendekatan Pengeluaran

Berdasarkan pendekatan pengeluaran, maka nilai barang dan jasa yang dibuat di dalam Negeri dijumlahkan untuk menentukan total pengeluaran komponen. Dengan pendekatan pengeluaran maka penggunaan total dapat diketahui peruntukannya dengan diperolehnya rumus pendekatan pengeluaran sebagai berikut.

$$Y = C + I + G + (X - M) \quad (2.3)$$

Keterangan:

Y = Pendapatan nasional

C = konsumsi rumah tangga

I = investasi

G = pengeluaran pemerintah

X = ekspor

M = impor

Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan pendekatan pendapatan disajikan dengan dua cara yaitu:

1) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Menurut Bank Indonesia (2018) dengan metode ini nilai tambah yang berupa barang maupun jasa dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada periode tahun tertentu sebagai tahun dasar. Penggunaan metode ini dapat mengetahui keadaan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun secara riil karena dengan metode ini berarti tidak ada pengaruh yang ditimbulkan dari faktor harga terhadap pertumbuhan ekonomi.

2) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Menurut Bank Indonesia (2018) ADHB dapat menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dari harga pada tahun berjalan. Penggunaan ADHB merupakan gambaran kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi di suatu daerah.

2.2.2.2 Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan

Noprian (2014) dalam Telasari (2017) menyatakan bahwa Negara dengan proses pembangunan ekonomi dan laju pertumbuhan yang cepat berbanding lurus dengan dengan tingkat kesenjangan pendapatan. Artinya semakin tinggi PDB maka semakin tinggi pula tingkat kesenjangan ekonomi antara kaum miskin dan kaya. Jika PDRB suatu daerah tinggi maka akan semakin makmur juga masyarakat di daerah tersebut, dan jika pendapatan per kapita di daerah tersebut semakin menurun maka akan terjadi yaitu bertambahnya jumlah penduduk miskin di daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Kuznet

(2001) mengatakan hubungan yang relatif kuat antara pertumbuhan dan kemiskinan karena pada tahap permulaan, kemungkinan terjadi peningkatan pada tingkat kemiskinan dan lambat laun sesuai dengan bertambahnya pembangunan menyebabkan terjadi pengurangan kemiskinan di suatu daerah. Hermanto dkk (2007) menyatakan bila pembelanjaan suatu negara yang berkembang diikuti dengan pendapatan antar wilayah yang merata maka dimungkinkan kemiskinan di wilayah tersebut akan mengalami pengurangan.

Penyebab dari kemiskinan di Indonesia yang mengalami penurunan lebih disebabkan karena beberapa faktor pendukung diantaranya terjadi peningkatan pada beberapa sektor diantaranya, Produk Domestik Bruto (PDB), investasi (dapat menyerap kebutuhan tenaga kerja yang telah dididik oleh pihak swasta dan pemerintah), inovatif, produktifnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan juga pertumbuhan penduduk melalui peningkatan modal manusia. (Wongdesmiwati, 2009)

2.2.3 Pendidikan

2.2.3.1 Pengertian Pendidikan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) memberikan makna pendidikan lebih kepada proses perubahan sikap dan tata laku dalam proses pendewasaan diri diri seorang atau sekelompok orang melalui jalur pengajaran dan pelatihan.

Sejalan dengan maksud Pendidikan Nasional menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003, di dalam undang undang tersebut lebih menekankan pada usaha yang dilakukan secara sadar dan terprogram dengan baik sehingga dapat menciptakan iklim belajar dan proses

pembelajaran yang aktif. Sehingga para peserta didik mampu mengembangkan potensi diri yang didukung dengan kekuatan, spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Sisdiknas,2003).

Penekanan Pendidikan menurut Syah (2010) lebih kepada memelihara potensi yang ada dengan cara pengajaran dan tuntunan budi pekerti, ketaatan dan kecerdasan pikiran melalui pemberian latihan. Menurut Astrini (2013) Pendidikan tidak hanya melalui proses secara formal namun juga dapat dilakukan melalui Keterampilan dan pengembangan diri yang dapat memberikan stimulus akan kualitas hidup yang lebih baik.

Melalui definisi yang telah dikemukakan di atas maka dapat dikatakan bahwa pendidikan dengan kemiskinan memiliki hubungan yang erat. Hal ini dapat dikatakan bahwa dengan Pendidikan yang makin tinggi maka kemampuan ketrampilan dan keahlian akan meningkat sehingga akan memberikan kualitas kerja yang lebih baik. Dikatakan demikian karena dengan pendidikan seseorang secara langsung dipersiapkan untuk memiliki bekal berupa kematangan dalam pengembangan metode berfikir dan memecahkan masalah secara sistematis yang dapat berguna dalam kehidupan di masa yang akan datang (Sedarmayati, 2001).

Jalur pendidikan di Indonesia menurut BPS terdapat tiga jenis, yaitu:

1. Pendidikan formal, merupakan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Dalam pendidikan formal memiliki jenjang pendidikan yang dimulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

2. Pendidikan nonformal, merupakan pendidikan yang diperoleh pada usia dini, serta pendidikan dasar adalah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) yang banyak diselenggarakan di masjid, dan sekolah minggu yang terdapat di semua gereja. Selain itu pengembangan bakat misal kursus musik, olahraga dan sebagainya.
3. Pendidikan informal, merupakan pendidikan yang diperoleh dari jalur keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilaksanakan secara tanggung jawab dan sadar.

Pendidikan merupakan salah satu investasi non fisik. Investasi bidang pendidikan diharapkan SDM mampu memiliki ketrampilan *softskill* dan IPTEK untuk mendorong produktivitas kerja individu. Persaingan di perusahaan menuntut pekerja memiliki kemampuan dan ketrampilan yang lebih sehingga gaji yang diberikan dapat sesuai dengan keterampilan yang. Rendahnya produktivitas individu miskin lebih dikarenakan minimnya dalam memperoleh pendidikan. (Kartasmita dalam Widyarworo,2013)

2.2.3.2 Indikator Pendidikan

Menurut BPS, untuk mengetahui penyerapan pendidikan di suatu wilayah maka digunakan beberapa indikator diantaranya: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM) (Sirusa, 2018).

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Secara definisi Angka Partisipasi Sekolah merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk

kelompok umur yang sesuai. Interpretasi APS bila menunjukkan tingkat yang tinggi maka terbukanya peluang yang besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Peluang dalam mengakses pendidikan dapat diamati dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

$$APS_{7-12} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100\%$$

$$APS_{13-15} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100\%$$

$$APS_{16-18} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun}} \times 100\%$$

$$APS_{19-24} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 19 – 24 tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 19 – 24 tahun}} \times 100\%$$

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Pendidikan Kasar secara definisi merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Secara interpretasi bila APK menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati bahkan lebih dari 100% menunjukkan bahwa ada penduduk

yang sekolahb belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

$$APK_{SD} = \frac{\text{Jumlah murid SD/Sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100\%$$

$$APK_{SMP} = \frac{\text{Jumlah murid SMP/Sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100\%$$

$$APK_{SMA} = \frac{\text{Jumlah murid SMA/Sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun}} \times 100\%$$

$$APK_{PT} = \frac{\text{Jumlah murid PT/Sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 19 – 24 tahun}} \times 100\%$$

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni secara definisi merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Secara interpretasi menunjukkan bahwa seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM=100, artinya semua anak usia sekolah tepat waktu dalam bersekolah.

$$APM_{SD} = \frac{\text{Jumlah murid SD/Sederajat usia 7 – 12tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100\%$$

$$APM_{SMP} = \frac{\text{Jumlah murid SMP/Sederajat usia 13 – 15tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100\%$$

$$APM_{SMA} = \frac{\text{Jumlah murid SMA/Sederajat usia 16 – 18tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun}} \times 100\%$$

$$APM_{PT} = \frac{\text{Jumlah murid PT/Sederajat usia 19 – 24tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 19 – 24 tahun}} \times 100\%$$

2.2.3.4 Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan

Menurut Amaliah (2015) untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia diperlukan peran serta pendidikan. Pernyataan tersebut juga didukung dengan pernyataan dari Criswardani Suryawati (2005) yang mengatakan bahwa keahlian dan wawasan yang diberikan dalam proses pendidikan seseorang diharapkan dapat membentuk pola pikir serta diberikan kemampuan dalam menghadapi dunia kerja maupun berwirausaha sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan. Selain itu dengan adanya pendidikan memberikan penanaman karakter individu yang secara tidak langsung berdampak pada martabat manusia dan memberikan tambahan keyakinan dalam meraih masa depan.

Hal ini sejalan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menempatkan indeks pendidikan menjadi yang terpenting dalam perhitungan. Perencanaan pembangunan nasional akan mudah diwujudkan bila indikator pendidikan sudah berjalan baik. Harapannya dengan adanya pendidikan persoalan tentang kemiskinan, produktivitas yang rendah dan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara dapat diatasi.

Dikatakan demikian karena menurut Sitepu (2010) keterampilan dan pengetahuan merupakan dampak dari proses pendidikan yang dijalani oleh setiap individu dalam menempuh pendidikan. Proses pendidikan dapat memberikan dampak positif terhadap produktivitas tenaga kerja. Pernyataan tersebut juga didukung dari pernyataan Rasidin k dan Bonar M (2004) yang mengatakan bahwa tingkat pendidikan seseorang berdampak pada pengetahuan dan keahliannya yang

pada akhirnya mampu mendorong produktivitas kerja. Hal ini di dukung dengan pernyataan dari Simmons (Todaro,1994) yang mengatakan bahwa dengan adanya pendidikan adalah salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Namun demikian, saat ini biaya pendidikan yang sulit dijangkau oleh orang miskin menyebabkan orang miskin tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu peran pemerintah sangat diperlukan melalui berbagaimacam kebijakannya untuk memberikan kemudahan bagi orang-orang miskin untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya

2.2.4 Jumlah Penduduk

2.2.4.1 Pengertian Penduduk

Badan Pusat Statistik (2018) mendefinisikan penduduk adalah orang yang berdomisili di wilayah geografis selama enam bulan atau lebih dan atau yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi berkeinginan untuk menetap.

Menurut Dumairy dalam Kumalasari (2011) mengamati bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Negara berkembang adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dikatakan demikian karena pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan terhambatnya pembangunan dan kesejahteraan umat. Namun bila dapat dikendalikan maka justru pertumbuhan penduduk dapat menjadikan sebagai salah satu modal dalam pembangunan.

Dikatakan sebagai penghambat pembangunan karena menurut Model Malthusian dalam Mankiw (2006) bahwa dengan adanya penambahan populasi maka sumber daya alam akan semakin berkurang. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, menurut Kremerian dalam Mankiw (2006) bahwa para pakar

keilmuan akan bertambah dengan pertumbuhan populasi. Dapat dikatakan bahwa dengan tumbuhnya populasi akan menjadi penentu majunya IPTEK.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan penduduk. Menurut Rahmawati (2017), faktor tersebut antara lain:

1. Fertilitas (Kelahiran)

Fertilitas adalah banyaknya jumlah bayi yang dilahirkan dalam suatu wilayah.

2. Mortalitas (Kematian)

Data tentang kematian digunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan dan sebagai tolak ukur perancangan pembangunan.

3. Migrasi

Migrasi digunakan untuk mengetahui persebaran penduduk sehingga dapat diketahui kesenjangan jumlah penduduk di masing masing wilayah di suatu Negara.

Menurut Todaro (2006) penyebab perubahan kependudukan lebih disebabkan oleh kematian baik secara alamiah maupun non alamiah (misalnya kecelakaan). Namun permasalahan tersebut sudah dapat diatasi sekitar abad kedua puluh, dengan majunya teknologi dan berkembangnya perekonomian. Hasilnya, tingkat kematian menunjukkan linearitas yang menurun hingga titik terendah.

Nehen (2012) mengatakan bahwa untuk menghitung pertambahan penduduk secara kuantitatif dapat digunakan persentase kenaikan relatif (atau persentase penurunan, apabila laju penduduk yang negatif) dari jumlah penduduk neto per tahun yang bersumber dari pertambahan alami (*natural increase*) dan migrasi

internasional neto (*net international migration*). Pertambahan alami diperoleh dari selisih antara tingkat fertilitas dan mortalitas. Sedangkan migrasi internasional neto diperoleh dari selisih antara jumlah penduduk yang beremigrasi dan berimigrasi.

Laju pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dengan jangka waktu tertentu. Dengan menggunakan metode aritmatik, geometric dan eksponensial laju pertumbuhan dapat dihitung sebagai berikut: (BPS)

1. Metode Aritmatik

Aritmatik asumsi yang digunakan dalam metode ini adalah \ jumlah penduduk tiap tahun selalu sama. Rumusnya:

$$P_t = P_0(1 + (rt)) \quad / \quad r = \frac{1}{t} \left(\frac{P_t}{P_0} - 1 \right)$$

Keterangan:

P_t = Jumlah penduduk setelah n tahun ke depan

P_0 = Jumlah penduduk pada tahun awal

r = Laju pertumbuhan penduduk

t = Periode waktu antara tahun dasar dan tahun t

2. Metode Geometrik

Asumsi yang digunakan adalah laju pertumbuhan penduduk sama setiap tahunnya. Metode ini digunakan untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$P_t = P_0(1 + r)^t \quad / \quad r = \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{t}} - 1$$

Keterangan:

P_t = jumlah penduduk pada tahun t

P_0 = jumlah penduduk pada tahun dasar

t = jangka waktu

r = laju pertumbuhan penduduk

Jika nilai $r > 0$, artinya jumlah penduduk bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Jika $r < 0$, dapat diartikan bahwa terjadi penurunan jumlah penduduk bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika $r = 0$, artinya tidak adanya perubahan jumlah penduduk bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Metode Eksponensial

Asumsi yang digunakan adalah pertumbuhan penduduk berlangsung terus-menerus akibat adanya kelahiran dan kematian di setiap waktu. Rumusnya adalah:

$$P_t = P_0 e^{rt} \quad \text{atau} \quad r = \frac{1}{t} \ln\left(\frac{P_t}{P_0}\right)$$

Keterangan:

P_t = Jumlah penduduk pada tahun ke- t

P_0 = Jumlah penduduk pada tahun dasar

t = jangka waktu

r = laju pertumbuhan penduduk

e = bilangan eksponensial yang besarnya 2,718281828

Jika nilai $r > 0$, artinya jumlah penduduk bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Jika $r < 0$, dapat diartikan bahwa terjadi penurunan jumlah penduduk bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika $r =$

0, artinya tidak adanya perubahan jumlah penduduk bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya..

2.2.4.2 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan

Sukirno dalam Rahmawati (2017), berpendapat bahwa penduduk memiliki peran dalam pembangunan sebab dengan adanya penambahan penduduk artinya jumlah tenaga kerja yang meningkat serta perluasan pasar yang meningkat pula. Sebaliknya penduduk bisa dianggap sebagai faktor yang menghambat pembangunan karena akan muncul pengangguran dan juga sumber daya manusia yang tingkat produktivitasnya buruk. Apabila dikaitkan dengan masalah kemiskinan maka jumlah penduduk bisa jadi pendukung permasalahan.

Sukirno (2006) mengatakan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi maka berpengaruh besar terhadap pembangunan khususnya di negara berkembang. Jumlah penduduk yang tinggi merupakan faktor yang mengganjal pembangunan dan sangat sulit diatasi. Di lain sisi dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi maka kebutuhan jumlah tenaga kerja tercukupi tetapi di sisi lain juga kemampuan negara mengelola tenaga kerja dengan terciptanya lapangan pekerjaan cukup sulit sebab keahlian dan ketrampilan menuntut adanya persaingan. Maka dari itu dengan adanya dua permasalahan tersebut maka akan timbul diantaranya: 1) pengangguran bertambah 2) terjadinya perpindahan penduduk ke kota besar 3) pengangguran di kota besar bertambah dan 4) kemiskinan bertambah parah.

2.2.5 Kesehatan

2.2.5.1 Pengertian Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu penentu dari produktivitas individu. Dengan demikian, Dikatakan demikian karena menurut Permana (2012) bahwa kesehatan merupakan salah satu bagian dari faktor produksi yang menentukan nilai tambah dari barang dan jasa.

Menurut Mils dan Gilson dalam Permana (2012) menerangkan bahwa penerapan kesehatan di bidang ekonomi memiliki keterkaitan antara : 1) sumber daya yang diperuntukkan bagi kesehatan 2) besarnya sumber daya yang digunakan dalam pelayanan 3) manajemen dan pembiayaan yang digunakan dalam pelayanan kesehatan 4) efesiensi sumber daya 5) akibat yang ditimbulkan dari berbagai upaya yang dilakukan dalam penanganan dan pengobatan terhadap individu dan masyarakat.

Lebih lanjut Juanita dalam Permana (2012) mengatakan bahwa kesehatan merupakan modal penting dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena pembangunan dibidang kesehatan juga harus diperhatikan oleh semua pihak. Dikatakan demikian agar kemakmuran dan kesejahteraan yang dicita-citakan dapat terwujud. Pernyataan tersebut artinya pembangunan kesehatan merupakan salah satu wujud investasi jangka Panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Dikatakan demikian karena pembangunan kesehatan merupakan sebagai sebuah proses perubahan dibidang kesehatan dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik sesuai dengan standar kesehatan.

Ukuran yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam mengevaluasi tingkat kesehatan masyarakat adalah melalui Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup mampu mengukur kondisi umur rata-rata yang mampu dilalui oleh

individu di suatu wilayah. Apabila Angka Harapan Hidup rendah berarti dapat dikatakan bahwa pembangunan kesehatan rendah pula, tetapi sebaliknya bila makin tinggi AHH maka pembangunan kesehatan di daerah tersebut dikatakan baik.

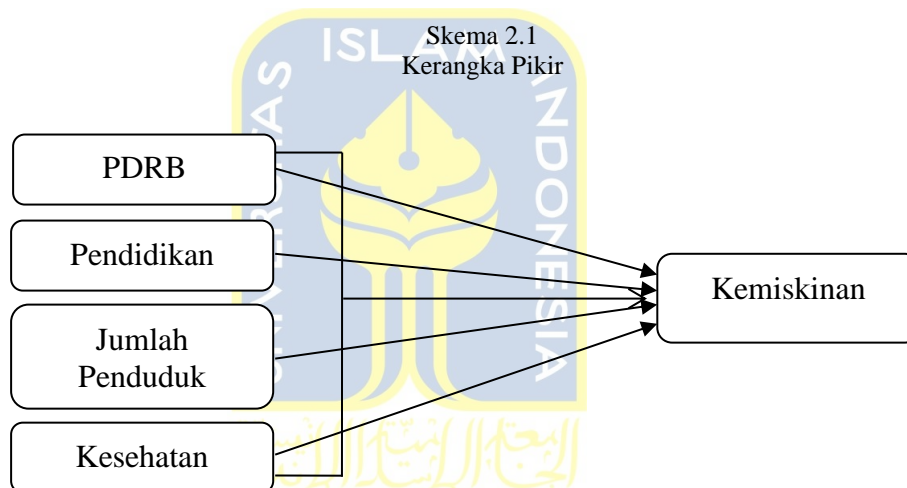
Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan perkiraan rata-rata tahun hidup seseorang hingga umur tertentu. Dengan menggunakan *indirect estimation* AHH dapat dihitung, jenis data berupa perhitungan Anak Lahir Hidup (ALH), Anak Masih Hidup (AMH) dan Indeks Harapan Hidup (IHH). Penetapan nilai indeks tertinggi maksimum dari United National Development Program (UNDP) adalah 85 tahun dan angka terendah yaitu 25 tahun.

2.2.5.2 Pengaruh Kesehatan terhadap Kemiskinan

Kemiskinan menyebabkan akses terhadap layanan kesehatan tidak maksimal. Hal ini disebabkan karena tingginya biaya terhadap layanan kesehatan. Adanya kemiskinan menyebabkan asupan gizi yang kurang sehingga berpengaruh pada kualitas individu baik daya tahan imun, kemampuan pola pikir, maupun prakarsa. Pemerintah telah berupaya melakukan investasi finansial baik berupa bantuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) hingga Penanaman Modal Asing (PMA) dibidang kesehatan sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan. Namun demikian Astuti (2015) menjelaskan bahwa selain penanaman modal di bidang kesehatan, pemerintah perlu merumuskan pengelolaan kesehatan yang baik. Hal ini dikarenakan dengan membaiknya kesehatan menjadi salah satu faktor keberhasilan produktivitas..

2.3 Kerangka Pikir

Penelitian ini menggunakan variabel kemiskinan sebagai dependen (Y) yang dipengaruhi oleh laju pertumbuhan PDRB (X1), tingkat pendidikan (X2), jumlah penduduk (X3), dan kesehatan (X4). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif masukan terhadap pemangku terhadap penyebab kemiskinan di Jawa Barat sehingga dapat dipertimbangkan mengenai alternatif kebijakan untuk pengentasan kemiskinan. Gambaran kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:.



2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap penelitian yang dilakukan berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya (Sugiyono, 2013). Maka dalam penelitian ini disusun hipotesis sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan

Kuznet (2001) mengatakan hubungan yang relatif kuat antara pertumbuhan dan kemiskinan karena pada tahap permulaan, kemungkinan terjadi peningkatan

pada tingkat kemiskinan dan lambat laun sesuai dengan bertambahnya pembangunan menyebabkan terjadi pengurangan kemiskinan di suatu daerah.

Menurut penelitian Hermanto S. Dan Dwi W. dalam Permana (2012) mengatakan bahwa bila perekonomian disuatu wilayah berkembang maka pendapatan individu menyebabkan distribusi menjadi merata.

Wongdesmiwati dalam Permana (2012) mengatakan bahwa penyebab dari kemiskinan di Indonesia yang mengalami penurunan lebih dikarenakan beberapa faktor pendukung diantaranya terjadi peningkatan pada beberapa sektor diantaranya, Produk Domestik Bruto (PDB), investasi (dapat menyerap kebutuhan tenaga kerja yang telah dididik oleh pihak swasta dan pemerintah), inovatif, produktifnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan juga pertumbuhan penduduk melalui peningkatan modal manusia. (Wongdesmiwati, 2009)

H_{a1} : PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2013-2017.

2.4.2 Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan

Rasidin K dan Bonar M (2004) dalam Permana (2012: 3) menyatakan bahwa penekanan pada teori pertumbuhan terdapat pada peranan pemerintah di dalam pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendukung dilakukan penelitian dan pengembangan sehingga memberikan dampak positif terhadap produktivitas manusia. Artinya. investasi pendidikan mampu meningkatkan pengetahuan dan sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia. sehingga produktivitas juga akan mengalami peningkatan.

H_{a2} : Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2013-2017.

2.4.3 Pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Kemiskinan

Pertambahan penduduk yang tidak terkendali menyebabkan kompleksnya permasalahan pembangunan dapat menambah kerumitan di Negara berkembang. Berdasarkan permasalahan tersebut, para ahli ekonomi lebih menyarankan pada pengurangan laju pertumbuhan penduduk guna meningkatkan laju perkembangan ekonomi. Akan tetapi, sampai sekarang hasil usaha ini belum dapat dikatakan memuaskan (Sukirno, 2006).

H_{a3} : Pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2013-2017.

2.4.4 Pengaruh Kesehatan terhadap Kemiskinan

Menurut Kartasasmita dalam Widyarworo (2013) kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh rendahnya derajat kesehatan. Hal ini dikarenakan kesehatan kurang prima menyebabkan daya tahan fisik akan menurun sehingga produktivitas yang dihasilkan juga berkurang. Dengan demikian kesehatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

H_{a4} : Kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2013-2017.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan menggunakan data skunder BPS pada tahun 2013-2017 terhadap tingkat kemiskinan, PDRB, pendidikan, pertumbuhan penduduk, dan kesehatan yang terjadi di 27 Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian dilakukan terhadap Provinsi Jawa Barat yang mencakup 27 Kab/kota (18 kabupaten dan 9 kota) di Jawa Barat. Meliputi; 1) Kabupaten Bogor, 2) Kabupaten Sukabumi, 3) Kabupaten Cianjur, 4) Kabupaten Bandung, 5) Kabupaten Garut, 6) Kabupaten Tasikmalaya, 7) Kabupaten Ciamis, 8) Kabupaten Kuningan, 9) Kabupaten Cirebon, 10) Kabupaten Majalengka, 11) Kabupaten Sumedang, 12) Kabupaten Indramayu, 13) Kabupaten Subang, 14) Kabupaten Purwakarta, 15) Kabupaten Karawang, 16) Kabupaten Bekasi, 17) Kabupaten Bandung Barat, 18) Kabupaten Pangandaran, sedangkan kota, 1) Kota Bogor, 2) Kota Sukabumi, 3) Kota Bandung, 4) Kota Cirebon, 5) Kota Bekasi, 6) Kota Depok, 7) Kota Cimahi, 8) Kota Tasikmalaya, dan 9) Kota Banjar.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang memiliki kriteria sesuai dengan masalah penelitian, atau keseluruhan kelompok yang akan diuji.

Sedangkan sebagian populasi yang akan diteliti memiliki ciri atau keadaan tertentu merupakan istilah dari sampel. (Martono,2010).

Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti adalah seluruh data terkait pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, kependudukan, dan tingkat kesehatan di kab/kota di Jawa Barat. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan data laju PDRB atas dasar harga konstan (ADHK), angka partisipasi murni (APM), jumlah pertumbuhan penduduk, dan angka harapan hidup (AHH) dari seluruh kab/kota di Jawa Barat.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional digunakan untuk memberikan penjelasan dan memudahkan dalam memahami variabel-variabel yang akan dilakukan analisis. Di dalam Penelitian ini meliputi lima variabel, diantaranya: Jumlah penduduk miskin (dependen), sedangkan PDRB, Angka Partisipasi Murni (APM), jumlah pertumbuhan penduduk, dan Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai variabel independent. Adapun definisi dari masing-masing variabel yang telah dipaparkan di atas adalah sebagai berikut yaitu:

1. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin merupakan proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan pendapatan rendah di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2013-2017 (dalam ribu jiwa).
2. Menurut Badan Pusat Statistik (PDB) laju PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi baik secara

menyeluruh/ per sektor dari tahun ke tahun, pengamatan di masing-masing kab/kota di Jawa Barat tahun 2013-2017 (dalam miliar).

3. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni secara definisi merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Secara interpretasi menunjukkan bahwa seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika $APM=100$, artinya semua anak usia sekolah tepat waktu dalam bersekolah. Dalam penelitian ini penyusun mengambil APM jenjang sekolah menengah atas di masing-masing kab/kota di Jawa Barat tahun 2013-2017 (dalam satuan persen).
4. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dengan jangka waktu tertentu. Dengan menggunakan metode aritmatik, geometric dan eksponensial laju pertumbuhan. Perhitungan berdasarkan masing-masing kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2013-2017 (dalam ribuan).
5. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tahun hidup seseorang hingga umur tertentu. Dalam penelitian ini digunakan AHH di masing masing kab/kota Jawa Barat tahun 2013-2017 (dalam satuan tahun).

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dan model *fixed effect*. Kelebihan data panel, adalah sebagai berikut (Setiawan, Kusriani, 2010):

- 1) Data panel berhubungan dengan individu, perusahaan, negara, provinsi, dan lain-lain selama beberapa waktu dengan batasan *heterogenitas* dalam setiap unitnya. Teknik estimasi data panel dapat mengambil *heterogenitas* tersebut secara eksplisit ke dalam perhitungan dengan mengizinkan variabel-variabel individunya.
- 2) Kombinasi antara data- data lintang, data panel dapat memberikan data yang lebih informatif, lebih variatif, kurang korelasi antar variabelnya, lebih banyak derajat kebebasannya, dan lebih efisien.
- 3) Kesesuaian mengamati perubahan secara dinamis
- 4) Mampu mendeteksi dan mengukur data yang tidak dapat diukur dalam interval berkala dan tampak lintang.
- 5) Dapat digunakan juga sebagai model mengamati perilaku fenomena skala ekonomi.
- 6) Meminimalkan kerumitan dalam penyajian data agar Nampak efisien.

Penggunaan data panel biasanya akan mengalami kendala pada koefisien *slope* dan intersepsi yang berbeda pada setiap organisasi pada periode waktu tertentu. Sehingga , pemahaman terhadap asumsi intersepsi, *slope*, dan error-nya. Hal ini lebih disebabkan adanya beberapa kemungkinan yang dapat terjadi,

diantaranya: koefisien *slope* konstan, tetapi koefisien intersepsi bervariasi pada setiap individu (Setiawan dan Kusri, 2010).

Artinya, dengan semakin kompleksnya variabel independennya, maka dapat dikatakan semakin kompleks juga estimasi parameternya. Sehingga diperlukan beberapa metode untuk melakukan estimasi parameternya. Metode-metode tersebut menurut Setiawan dan Kusri (2010) adalah sebagai berikut:

1. *Common Effect*

Common Effect merupakan salah satu teknik dasar yang dapat digunakan untuk memperkirakan data panel. *Common Effect* dilakukan dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Dikatakan sederhana, karena dalam *Common Effect* tidak mempertimbangkan dimensi individu maupun waktu. Asumsi yang dipergunakan adalah perilaku data antar variabel memiliki kesamaan dalam periode waktu tertentu (Widarjono, 2009).

Common Effect atau *Pooled Least Square* (PLS) menggunakan asumsi yang memiliki hubungan antara perilaku unsur gangguan atau *error term*. Selebihnya asumsi tersebut berkaitan dengan variabel bebas (Rasyid, 2016).

Teknik *common effect* menggunakan model persamaan regresinya sebagai berikut: (Widarjono, 2009)

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it} \quad (3.2)$$

2. *Fixed Effect*

Teknik yang digunakan dalam metode ini adalah dengan memperkirakan data panel melalui variabel dummy untuk melihat adanya perbedaan intersep. Model ini melihat perbedaan intersep antara variabel namun intersepanya memiliki

kesamaan antar waktu (*time invariant*). Model ini lebih dikenal dengan *Least Squares Dummy Variables* (LSDV) (Widarjono, 2009).

Model peresamaannya adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 D_{1i} + \beta_4 D_{2i} + \beta_5 D_{3i} + e_{it} \quad (3.3)$$

3. *Random Effect*

Metode estimasi *Random Effect* memperkirakan data panel antara variabel gangguan yang memiliki kemungkinan saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Asumsi yang digunakan adalah setiap variabel memiliki perbedaan intersep, namun intersep adalah variabel random atau stokastik. Model ini dipergunakan ketika individu variabel yang kita ambil sebagai sampel adalah dipilih secara random dan merupakan wakil dari populasi (Widarjono, 2009).

3.5.2 Uji Spesifikasi Model

1. Uji Chow Test

Uji Chow digunakan untuk membandingkan antara teknik regresi data panel dengan *fixed effect* dan model regresi data panel tanpa variabel dummy (*common effect*). Uji ini dilakukan dengan melihat *sum of squared residuals* (RSS). Uji ini diukur melalui Nilai nilai F hitung > nilai F kritis, maka hipotesis ditolak dan model yang dipilih model *common effect*. Jika F hitung < nilai F kritis Hipotesis nol diterima, sehingga model yang digunakan model *fixed effect*. (Widarjono, 2013).

2. Uji Hausman Test

Uji Hausman digunakan untuk memilih model *fixed effect* dan model *random effect*. Uji Hausman mengikuti distribusi statistik Chi Square dengan jika

kita menolak hipotesis nol yaitu ketika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *fixed effect*. Sedangkan bila kita gagal menolak hipotesis nol yaitu ketika nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *random effect* (Widarjono, 2013).

Fungsi matematika adalah sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4) \quad (3.4)$$

Berdasarkan persamaan diatas diubah ke dalam bentuk linier berganda

menjadi:

$$Y_{it} = \beta_i + \beta X_{it1} + \beta X_{it2} + \beta X_{it3} + \beta X_{it4} + \varepsilon_{it} \quad (3.5)$$

Dimana:

Y = jumlah penduduk miskin(ribu jiwa)

β_i = bilangan konstanta

β = koefisien regresi

X_{it1} = Laju PDRB (miliar)

X_{it2} = Angka Partisipasi Murni (%)

X_{it3} = jumlah Pertumbuhan Penduduk (ribu jiwa)

X_{it4} = Angka Harapan Hidup (tahun)

ε_{it} = term of error

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis

Jawa Barat yang merupakan Provinsi dengan letak di bagian Barat Pulau Jawa ini terletak di antara 5°50'-7°50' Lintang Selatan dan 104° 48'-108° 48' Bujur Timur. Batas wilayah Provinsi Jawa Barat sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta; sebelah timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah; sebelah selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia; sebelah barat, berbatasan dengan Provinsi Banten. Luas wilayah Jawa Barat adalah berupa daratan seluas 35.377,76 km².

Provinsi Jawa Barat dengan pusat pemerintahan di Kota Bandung secara administrasi terdiri dari 27 kabupaten/kota (18 kabupaten dan 9 kota), yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.

4.1.2 Kemiskinan

Kemiskinan oleh BPS diukur berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dikatakan miskin jika rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Adapun Garis kemiskinan dihitung melalui penjumlahan antara garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan diartikan sebagai jumlah nilai pengeluaran yang terdiri atas 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk yang setara dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Garis kemiskinan non makanan dihitung dari penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan, yang diantaranya adalah perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka data jumlah penduduk miskin di 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2013 sampai 2017 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017 (Ribu jiwa)

Wilayah	2013	2014	2015	2016	2017
Provinsi Jawa Barat	4375.2	4239.0	4435.70	4224.32	4168.44
Kab Bogor	499.1	479.1	487.1	490.8	487.28
Kab Sukabumi	222.8	213.6	217.86	198.66	197.12
Kab Cianjur	267.9	256.6	273.9	261.39	257.41
Kab Bandung	271.7	266.8	281.04	272.65	268.02
Kab Garut	320.9	315.6	325.67	298.52	291.24
Kab Tasikmalaya	199.3	194.8	208.12	195.61	189.35
Kab Ciamis	133	130	104.87	98.77	96.76
Kab Kuningan	139.4	133.6	147.21	144.07	141.55
Kab Cirebon	307.2	300.5	313.21	288.49	279.55
Kab Majalengka	164.9	158	167.5	152.5	150.26

Kab Sumedang	127.4	122	129.03	120.6	120.63
Kab Indramayu	251.1	240.7	253.12	237	233.38
Kab Subang	185.4	177.9	187.17	170.37	167.79
Kab Purwakarta	83.6	80.3	83.94	83.55	85.25
Kab Karawang	238.6	229	235.03	230.6	236.84
Kab Bekasi	157.7	156.6	169.2	164.41	163.95
Kab Bandung Barat	206	197.9	205.69	192.48	190.89
Kab Pangandaran	0	0	41.97	40.14	39.46
Kota Bogor	83.3	80.1	79.15	77.28	76.53
Kota Sukabumi	25.2	24.1	27.84	27.51	27.41
Kota Bandung	115	114.12	107.58	33.2	103.98
Kota Cirebon	31.9	30.6	31.74	30.15	30.19
Kota Bekasi	137.8	139.7	146.94	140.03	136.01
Kota Depok	45.9	47.5	49.97	50.56	52.34
Kota Cimahi	32.3	31.8	34.09	35.07	34.53
Kota Tasikmalaya	112.2	104.6	106.78	102.79	97.85
Kota Banjar	12.8	12.7	13.42	12.74	12.87

Sumber: BPS Jabar, diolah.

Dari tabel 4.1, dapat diketahui bahwa secara umum jumlah penduduk miskin di Jawa Barat cenderung mengalami penurunan. Penurunan terjadi dari tahun 2013 sampai tahun 2014 dengan penurunan sebesar 136.2 ribu jiwa. Lalu pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 196.7 ribu jiwa dan kembali menurun di tahun 2017. Apabila dilihat dari kabupaten/kota, pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin tertinggi terdapat di Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk miskin sebesar 490.8 ribu jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin terendah terdapat di kota Banjar dengan jumlah penduduk miskin sebesar 12.74 ribu jiwa.

4.1.3 PDRB

Nilai PDRB digunakan sebagai salah satu metode alat ukur kesejahteraan wilayah. Dengan adanya PDRB dapat diketahui masyarakat yang dikategorikan

sebagai masyarakat yang sejahtera. PDRB yang tinggi dapat diartikan bahwa produk di suatu wilayah juga mengalami peningkatan. Dengan adanya produk yang meningkat maka pendapatan individu juga akan mengalami peningkatan pula. Menurut BPS, Produk Domestik Bruto (PDRB) dihitung dari penjumlahan nilai output bersih yang terdiri dari barang dan jasa akhir dari keseluruhan kegiatan ekonomi baik berupa kegiatan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan jasa-jasa di suatu wilayah tertentu baik provinsi maupun kabupaten dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender). Berikut disajikan data PDRB yang terjadi menurut kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2013 sampai 2017.

Tabel 4.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2017 (miliar)

Wilayah	2013	2014	2015	2016	2017
Provinsi Jawa Barat	1093543.55	1149216.06	1207083.41	1275546.48	1350826.112
Kab Bogor	110685.28	117339.5	124488.48	132085.87	139951.95
Kab Sukabumi	33516.82	35521.43	37265.25	39338.46	33516.82
Kab Cianjur	22883.16	24041.99	25357.13	26981.37	35521.43
Kab Bandung	57690.59	61100.25	64701.52	68804.85	37265.25
Kab Garut	29138.48	30541.63	31919.04	33803.54	39338.46
Kab Tasikmalaya	17991.12	18849.71	19662.49	20824.8	41362.08
Kab Ciamis	16026.51	16839.42	17779.91	18844.97	22883.16
Kab Kuningan	11648.54	12385.38	13175.67	13977.77	24041.99
Kab Cirebon	25042.25	26312.99	27596.25	29149.23	25357.13
Kab Majalengka	15012.89	15750.66	16590.93	17591.79	26981.37
Kab Sumedang	17194.51	18004.69	18950.36	20029.72	28524.43
Kab Indramayu	52858.95	55464.11	56663.3	56706.18	57690.59
Kab Subang	21431.37	22506.48	23696.76	24976.92	61100.25
Kab Purwakarta	34216.42	36177.32	37902.42	40170.99	64701.52
Kab Karawang	120294.86	126748.69	132453.57	140782.54	68804.85
Kab Bekasi	186206.59	197163.57	205967.48	216228.36	73051.18

Kab Bandung Barat	22937.17	24264.92	25486.17	26925.88	29138.48
Kab Pangandaran	5733.33	5973.33	6271.1	6602.73	30541.63
Kota Bogor	22484.67	23835.31	25298.6	27002.25	31919.04
Kota Sukabumi	6301.68	6643.6	6984.11	7379.48	33803.54
Kota Bandung	129005.46	138960.94	149580.38	161227.83	35456.65
Kota Cirebon	11863.88	12541.22	13269.24	14062.8	17991.12
Kota Bekasi	49741.13	52534.09	55457.81	58831.08	18849.71
Kota Depok	32805.89	35192.76	37529.48	40263.23	19662.49
Kota Cimahi	16072.36	16955.24	17876.39	18881.69	20824.8
Kota Tasikmalaya	10961.87	11637.31	12370.67	13225.25	22063.29
Kota Banjar	2373.51	2624.24	2778.08	2920.4	16026.51

Sumber: BPS Jabar, diolah.

Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa laju PDRB di Jawa Barat dari tahun 2013 sampai 2017 terus mengalami kenaikan, yaitu dari 1093543.55miliar pada tahun 2013 terus beranjak naik menjadi 1275546.48 miliar di tahun 2016. Apabila dilihat dari kabupaten/kota, pada tahun 2016 PDRB tertinggi terjadi di kabupaten Bekasi dengan laju PDRB sebesar 216228.36 miliar. Sedangkan laju PDRB terendah terjadi di kota Banjar dengan laju PDRB sebesar 2920.4 miliar.

4.1.4 Pendidikan

Penekanan pemerintah terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia, telah mendorong penelitian-penelitian untuk dapat meningkatkan produktivitas manusia. Penekanan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut telah berdampak pada investasi dibidang pendidikan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia itu dapat tercermin dari semakin bertambahnya *skill* dan *soft skill* seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengetahuan dan keahlian seseorang akan bertambah sesuai dengan jenjang pendidikan yang telah ditempuh. Sehingga secara tidak langsung akan berdampak pada

peningkatan produktivitas kerjanya. Mahalnya biaya pendidikan saat ini secara tidak langsung berdampak pula pada rendahnya produktivitas kaum miskin. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pula dalam memperoleh akses pendidikan. Salah satu indikator untuk mengukur program pembangunan di bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM merupakan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya. Berikut disajikan data angka partisipasi murni di kabupaten/kota provinsi Jawa Barat yang digunakan sebagai ukuran pendidikan.

Tabel 4.3
 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Atas di Jawa Barat
 Tahun 2013-2017 (Persen)

Wilayah	2013	2014	2015	2016	2017
Provinsi Jawa Barat	40.58	40.31	46.04	50.66	55.58
Kab Bogor	31.04	30.85	40.31	43.15	48.46
Kab Sukabumi	26.03	25.88	32.54	40.32	26.03
Kab Cianjur	26.85	30.3	33.09	41.83	25.88
Kab Bandung	33.46	33.61	39.25	41.32	32.54
Kab Garut	34.11	34.93	39.34	42.01	40.32
Kab Tasikmalaya	29.7	25.31	32.1	42.31	47.70
Kab Ciamis	31.28	29.59	39.82	46.68	26.85
Kab Kuningan	52.75	52.25	54.06	58.63	30.3
Kab Cirebon	32.55	31.47	36.68	43.38	33.09
Kab Majalengka	38.28	38.05	36.15	48.64	41.83
Kab Sumedang	48.22	46.72	50.5	52.56	49.04
Kab Indramayu	41.14	43.26	49.66	53.12	33.46
Kab Subang	42.64	42.84	54.13	59.32	33.61
Kab Purwakarta	35.39	29.97	37.06	45.51	39.25
Kab Karawang	44.67	44.2	48.9	50.73	41.32
Kab Bekasi	50.17	47.08	51	55.37	46.91
Kab Bandung Barat	32.03	31.5	35	44.84	34.11

Kab Pangandaran	35.09	34.68	30.78	40.49	34.93
Kota Bogor	68.64	68.42	78.61	73.03	39.34
Kota Sukabumi	73.52	67.17	71.61	77.73	42.01
Kota Bandung	63.24	64.08	70.28	73.91	49.10
Kota Cirebon	69.48	66.18	67.6	71.77	29.7
Kota Bekasi	54.95	59.8	62.16	62.21	25.31
Kota Depok	50.49	50.36	61.64	61.83	32.1
Kota Cimahi	63.79	65.6	66.7	71.21	42.31
Kota Tasikmalaya	62.88	61.94	60.34	71.94	50.20
Kota Banjar	58.96	56.75	62.27	66.84	31.28

Sumber: BPS Jabar, diolah.

Dari tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa APM pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jawa Barat tahun 2013 sampai 2017 cenderung mengalami naik turun. Penurunan terjadi pada tahun 2014 dengan APM sebesar 40,31 persen dari sebelumnya 40,58 persen pada tahun 2013. Apabila dilihat dari kabupaten/kota, pada tahun 2016 APM tertinggi terdapat di kota Sukabumi dengan APM sebesar 77,73 persen. Sedangkan APM terendah terdapat di kabupaten Sukabumi dengan APM sebesar 40,32 persen.

4.1.5 Jumlah Penduduk

Permasalahan utama di negara berkembang dalam pembangunan adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang terlalu tinggi. Solusi yang ditawarkan oleh para pakar ekonomi adalah dengan cara melakukan meminimalisir tingkat pertumbuhan penduduk, sehingga diharapkan dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang rendah maka secara tidak langsung dapat meningkatkan perkembangan ekonomi. Berikut adalah jumlah pertumbuhan penduduk di kabupaten/kota provinsi Jawa Barat tahun 2013 sampai 2017.

Tabel 4.4

Jumlah Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017 (ribu)

Wilayah	2013	2014	2015	2016	2017
Provinsi Jawa Barat	45.340.812	46.029.668	46.709.569	47.379.389	48.037.612
Kab Bogor	5.202.097	5.331.149	5.459.668	5.715.009	5.202.097
Kab Sukabumi	5.331.149	2.422.113	2.434.221	2.453.498	5.331.149
Kab Cianjur	5.459.668	2.235.418	2.243.904	2.256.589	5.459.668
Kab Bandung	5.587.39	3.470.393	3.534.114	3.657.601	5.587.39
Kab Garut	5.715.009	2.526.186	2.548.723	2.588.839	5.715.009
Kab Tasikmalaya	2.408.417	1.728.587	1.735.998	1.747.318	2.408.417
Kab Ciamis	2.422.113	1.162.102	1.168.682	1.181.981	2.422.113
Kab Kuningan	2.434.221	1.049.084	1.055.417	1.068.201	2.434.221
Kab Cirebon	2.444.62	2.109.588	2.126.179	2.159.577	2.444.62
Kab Majalengka	2.453.498	1.176.313	1.182.109	1.193.725	2.453.498
Kab Sumedang	2.225.313	1.131.516	1.137.273	1.146.435	2.225.313
Kab Indramayu	2.235.418	1.682.022	1.691.386	1.709.994	2.235.418
Kab Subang	2.243.904	1.513.093	1.529.388	1.562.509	2.243.904
Kab Purwakarta	2.250.98	9.100.07	9.215.98	9.433.37	2.250.98
Kab Karawang	2.256.589	2.250.120	2.273.579	2.316.489	2.256.589
Kab Bekasi	3.405.475	3.122.698	3.246.013	3.500.023	3.405.475
Kab Bandung Barat	3.470.393	1.609.512	1.629.423	1.666.510	3.470.393
Kab Pangandaran	3.534.114	3.883.20	3.904.83	3.950.98	3.534.114
Kota Bogor	3.596.62	1.030.720	1.047.922	1.081.009	3.596.62
Kota Sukabumi	3.657.601	3.150.01	3.181.17	3.237.88	3.657.601
Kota Bandung	2.502.410	2.470.802	2.481.469	2.497.938	2.502.410
Kota Cirebon	2.526.186	3.045.84	3.074.94	3.133.25	2.526.186
Kota Bekasi	2.548.723	2.642.508	2.714.825	2.859.630	2.548.723
Kota Depok	2.569.51	2.033.508	2.106.102	2.254.513	2.569.51
Kota Cimahi	2.588.839	5.865.80	6.010.99	6.498.85	2.588.839
Kota Tasikmalaya	1.720.123	6.547.94	6.574.77	6.614.04	1.720.123
Kota Banjar	1728587	180515	181425	182388	1728587

Sumber: BPS Jabar, diolah.

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa secara pertumbuhan penduduk di Jawa Barat terus mengalami kenaikan, yaitu dari 45,340,812 ribu jiwa di tahun 2013 menjadi 47,379,389 ribu jiwa di tahun 2016. Apabila dilihat dari kabupaten/kota,

pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di kabupaten Bogor. Sedangkan pertumbuhan penduduk terendah terjadi di kabupaten Banjar.

4.1.6 Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi, dikatakan demikian karena masyarakat yang memiliki tingkat kesehatan yang baik juga akan berdampak pada tingkat produktivitas yang tinggi. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pembangunan kesehatan masyarakat. Artinya pembangunan ekonomi dan kesehatan harus dikelola dengan baik dan bersinergi agar tujuan kemakmuran masyarakat dapat tercapai. Pembangunan kesehatan diharapkan mampu memberikan dampak yang positif terhadap kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan kesehatan diharapkan tidak hanya berupa slogan semata tetapi juga merupakan prioritas utama.

Guna mengevaluasi pembangunan kesehatan di suatu wilayah, maka diperlukan Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai alat ukurnya. Angka Harapan Hidup memberikan informasi terhadap umur rata-rata yang dapat dicapai seseorang. Dapat dikatakan bahwa Angka Harapan Hidup yang rendah artinya pembangunan kesehatan juga rendah, dan semakin tinggi AHH semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pembangun kesehatan. Berikut adalah angka harapan hidup kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2013 sampai 2017.

Tabel 4.5

Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017 (Tahun)

Wilayah	2013	2014	2015	2016	2017
Provinsi Jawa Barat	72.09	72.23	72.41	72.44	72.47
Kab Bogor	70.47	70.49	70.59	70.65	70.70
Kab Sukabumi	69.70	69.73	70.03	70.14	69.70
Kab Cianjur	69.04	69.08	69.28	69.39	69.73
Kab Bandung	72.96	72.97	73.07	73.10	70.03
Kab Garut	70.47	70.49	70.69	70.76	70.14
Kab Tasikmalaya	67.90	67.96	68.36	68.54	70.26
Kab Ciamis	70.29	70.34	70.74	70.90	69.04
Kab Kuningan	72.21	72.24	72.64	72.76	69.08
Kab Cirebon	71.25	71.28	71.38	71.43	69.28
Kab Majalengka	68.60	68.66	69.06	69.22	69.39
Kab Sumedang	71.86	71.89	71.91	71.96	69.49
Kab Indramayu	70.25	70.29	70.59	70.72	72.96
Kab Subang	71.19	71.22	71.52	71.61	72.97
Kab Purwakarta	69.95	69.96	70.26	70.34	73.07
Kab Karawang	71.44	71.45	71.55	71.60	73.10
Kab Bekasi	73.13	73.16	73.18	73.24	73.13
Kab Bandung Barat	71.56	71.56	71.76	71.82	70.47
Kab Pangandaran	69.79	69.84	70.24	70.40	70.49
Kota Bogor	72.57	72.58	72.88	72.95	70.69
Kota Sukabumi	71.75	71.76	71.86	71.90	70.76
Kota Bandung	73.79	73.80	73.82	73.84	70.84
Kota Cirebon	71.75	71.77	71.79	71.83	67.90
Kota Bekasi	74.17	74.18	74.48	74.55	67.96
Kota Depok	73.94	73.96	73.98	74.01	68.36
Kota Cimahi	73.56	73.56	73.58	73.59	68.54
Kota Tasikmalaya	70.93	70.96	71.26	71.37	68.71
Kota Banjar	70.20	70.24	70.26	70.33	70.29

Sumber: BPS Jabar, diolah.

Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa AHH di Jawa Barat dari tahun 2013 hingga 2017 terus mengalami kenaikan, yaitu dari 72,09 tahun pada tahun 2013 menjadi 72,47 tahun pada tahun 2017. Apabila dilihat dari kabupaten/kota, pada tahun 2016 AHH tertinggi terdapat di kota Bekasi dengan AHH sebesar 74,55

tahun. Sedangkan AHH terendah terdapat di Kabupaten Tasikmalaya dengan AHH sebesar 68,54 tahun.

4.2 Pemilihan Model Data Panel

1. *Chow Test*

Untuk memilih model yang tepat maka dalam penelitian ini menggunakan Uji *Chow*. Uji ini untuk memilih antara *Common Effect* atau *Fixed Effect*.

Hipotesis dari uji ini adalah:

$H_0 = \text{Common Effect Model/PLS}$

$H_a = \text{Fixed Effect Model}$

Hasil output dari *Common Effect* dan *Fixed Effect* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Hasil Uji Likelihood

Chi-Square	Statistic	d.f	Prob.
<i>Cross-section F</i>	431.612030	(26,104)	0.0000
Kesimpulan :	Prob. < 0.05 Ho ditolak Model <i>Fixed Effect</i> lebih baik dari Model <i>Common Effect</i>		
$\alpha = 0.05$			

Sumber: *Output Eviews 8* data diolah kembali pada lampiran 7

Dari Tabel 4.6 di atas, nilai probabilitas dari *Cross section F* sebesar 0,0000 < 0,05. Artinya model *Fixed Effect* lebih tepat digunakan dari pada model *Common Effect*.

2. Hausman Test

Hausman Test dilakukan memilih antara model *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*. Dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 = \text{Random Effect Model (REM)}$

$H_a = \text{Fixed Effect Model (FEM)}$

Data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7

Hasil Uji Hausman

Chi-Square	Statistic	Chi-Square d.f	Prob.
<i>Cross-section F</i>	95.305071	4	0.0000
Kesimpulan :	Prob. < 0.05 Ho ditolak Model <i>Fixed Effect</i> lebih baik dari Model <i>Random Effect</i>		
$\alpha = 0.05$			

Sumber: *OutputEviews 8* data diolah kembali pada lampiran 8

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Cross Section F* sebesar $0.0000 < 0.05$. Artinya model *Fixed Effect* lebih baik daripada model *Random Effect*.

Dari dua uji pemilihan model di atas didapatkan hasil bahwa model yang dipilih adalah model *Fixed Effect*

3. Hasil Estimasi *Fixed Effect Model*

Pengujian koefisien regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yakni laju PDRB, pendidikan, pertumbuhan penduduk, dan kesehatan

terhadap variabel dependen yakni tingkat kemiskinan. Berikut adalah hasil estimasi dari model terpilih yakni *Fixed Effect Model*.

Tabel 4.8
Hasil Estimasi Model Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan

	Coefficient	Probability	Kesimpulan
PDRB	0.000171	0.2534	Positif, Tidak Signifikan
APM_SMA	-0.858194	0.0000	Negatif, Signifikan
JUMLAH PENDUDUK	9.38E-07	0.2615	Positif, Tidak Signifikan
AHH	13.15803	0.0313	Positif, Signifikan
C	746.9207	0.0813	
R-Squared	0.996092		
F-statistik	883.7079		
Prob (F-statistik)	0.000000		

Sumber: *Outputsoftwareviews 8* data diolah kembali pada lampiran 5

Berdasarkan hasil *Uji Chow* dan *Uji Hausman* pada tabel 4.6 dan tabel 4.7, maka terpilih model yang terbaik yaitu *model Fixed Effect* sebagai model estimasi untuk mengetahui pengaruh variabel laju PDRB, pendidikan, pertumbuhan penduduk, dan kesehatan terhadap variabel tingkat kemiskinan. Adapun model persamaannya yakni sebagai berikut:

$$\text{TINGKAT KEMISKINAN} = 746.9207 + 0.000171 \cdot \text{PDRB} - 0.858194 \cdot \text{APM} + 9.38\text{E-}07 \cdot \text{PERTUMBUHAN PENDUDUK} + 13.15803 \cdot \text{AHH} + e \quad (4.1)$$

Dari hasil persamaan tabel 4.8 tersebut, maka dapat diinterpretasikan secara ekonomi sebagai berikut:

- a) Persamaan regresi panel di atas diketahui mempunyai konstanta sebesar 746.9207 Hal ini menunjukkan bahwa jika besaran variabel-variabel independen yakni PDRB, pendidikan, pertumbuhan penduduk, dan

kesehatan dianggap konstan dan tidak mengalami perubahan, maka nilai variabel dependen yakni tingkat kemiskinan adalah sebesar 746.9207.

- b) Nilai koefisien dari laju PDRB sebesar + 0.000171. Nilai tersebut diartikan apabila variabel PDRB bertambah 1 miliar sedangkan variabel independent lain tetap maka tingkat kemiskinan di Jawa Barat naik sebesar 0.000171
- c) Nilai koefisien dari APM sebesar -0.858194. Artinya apabila APM naik sebesar 1%, sedangkan variabel independent lain tetap maka tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat akan turun sebesar 0.858194.
- d) Nilai koefisien dari pertumbuhan penduduk sebesar +9.38E-07. Artinya apabila variabel pertambahan jumlah penduduk bertambah 1 ribu jiwa sedangkan variabel independent yang lain tetap maka tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat akan naik sebesar 9.38E-07.
- e) Nilai koefisien dari AHH sebesar +13.15803, dapat diartikan bahwa apabila variabel AHH bertambah 1 tahun sedangkan variabel independent yang lain tetap maka tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat akan naik sebesar 13.15803.

4.3 Pengujian Hipotesis

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Uji T digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependennya. Derajat kepercayaan yang digunakan untuk penelitian sebesar 95% ($\alpha = 0,05$). Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima. Hal ini menandakan bahwa variabel independen secara parsial/individu dapat berpengaruh terhadap variabel dependennya.

- a. PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2013-2017

Berdasarkan tabel 4.8, dapat diketahui bahwa Nilai koefisien dari laju PDRB sebesar + 0.000171 dengan nilai probabilitas sebesar 0.2534 pada $\alpha=5\%$. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 ($0.2534 > 0.05$), dan nilai koefisien bernilai positif (+) maka hipotesis yang menyatakan “PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2013-2017” ditolak.

- b. Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2013-2017

Berdasarkan tabel 4.8, dapat diketahui bahwa Nilai koefisien dari APM sebesar -0.858194 dan dengan probabilitas 0.0000 pada $\alpha=5\%$. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 ($0.000 < 0.05$), dan nilai koefisien bernilai negatif (-). Maka hipotesis Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2013-2017 diterima.

- c. Pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2013-2017.

Berdasarkan tabel 4.8, dapat diketahui bahwa Nilai koefisien dari pertumbuhan penduduk sebesar +9.38E-07 dan nilai probabilitas 0.2615. pada $\alpha=5\%$. Nilai koefisien bernilai positif (+), namun nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 ($0.2615 > 0.05$). Maka hipotesis yang menyatakan Pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2013-2017 ditolak.

d. Kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2013-2017.

Berdasarkan tabel 4.8, dapat diketahui bahwa nilai koefisien dari AHH sebesar +13.15803 dengan probabilitas 0.0313. pada $\alpha=5\%$. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 ($0.0313 > 0.05$). Namun nilai koefisien bernilai positif (+), dapat diartikan bahwa semakin tinggi Tingkat Angka Harapan Hidup maka semakin tinggi Kemiskinan. Maka hipotesis yang menyatakan Kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2013-2017 ditolak

2. Uji Signifikansi Parameter Serentak (Uji F)

Guna mengetahui pengaruh variabel independent secara simultan terhadap variabel dependen, maka digunakan Uji F. Hipotesisnya adalah

(H₀): secara simultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

(H_a): Secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dengan ketentuan nilai probabilitas (F-Statistik) $< 0,05$ Maka H₀ ditolak, begitu pula sebaliknya.

Tabel 4.10
Hasil Uji F

Sum of Square	Mean Square	F-Stat	Prob
6200.960	158.8344	883.7079	0.000000

Sumber: *outputEviews* 8 data diolah kembali pada lampiran 5

Nilai probabilitas pada Uji F tersebut adalah $0.000000 < 0,05$, dengan demikian H_0 ditolak. Artinya, variabel laju PDRB, APM, pertumbuhan penduduk, dan AHH secara simultan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Barat pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$).

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan variabel independen secara simultan untuk menjelaskan variabel dependennya.

Tabel 4.11
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R-Square	Adjusted R-Square
1	0.996092	0.994965

Sumber: *outputEviews* 8 data diolah kembali pada lampiran 6

Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah 0.996092. Artinya, variabel independen (laju PDRB, APM, pertumbuhan penduduk, dan AHH) mampu menjelaskan variabel dependen (tingkat kemiskinan) sebesar 99,60% dan sisanya sebesar 0,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

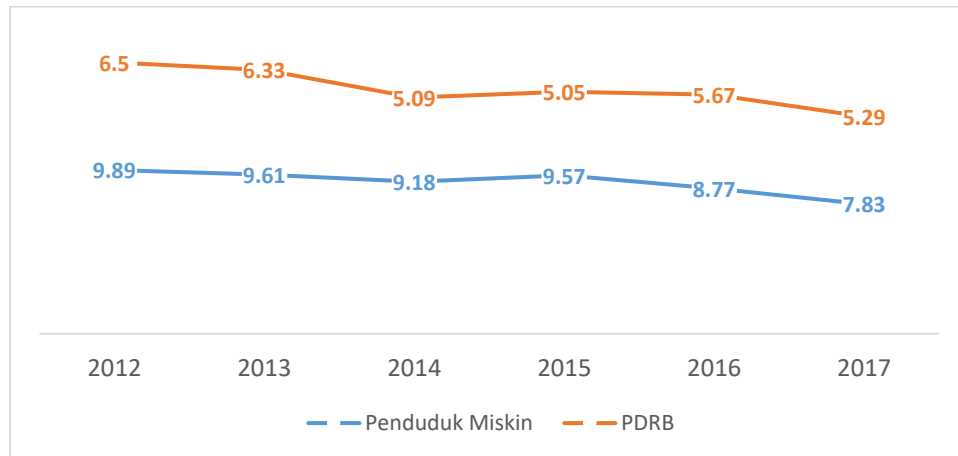
4.4 Pembahasan

1. PDRB tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2013-2017

Pada tabel 4.8 di atas, diperoleh probabilitas $0.2534 > 0.05$. Dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2013-2017. Artinya meningkatnya laju PDRB di Jawa Barat tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat. Hasil tersebut tidak sesuai dengan teori menurut Kuznet dalam Permana (2012) mengatakan hubungan yang relatif kuat antara pertumbuhan dan kemiskinan karena pada tahap permulaan, kemungkinan terjadi peningkatan pada tingkat kemiskinan dan lambat laun sesuai dengan bertambahnya pembangunan menyebabkan terjadi pengurangan kemiskinan di suatu daerah. Selanjutnya menurut Hermanto S. dan Dwi W. dalam Permana (2012) mengatakan bahwa peran pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai metode untuk menekan jumlah penduduk miskin.

Peningkatan PDRB yang terjadi di Jawa Barat tahun 2012-2017 tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Jawa Barat dapat dilihat dari data bahwa peningkatan laju PDRB di Jawa Barat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 tidak selalu diiringi dengan penurunan kemiskinan di Jawa Barat. Hal ini dapat diketahui dari diagram garis perbandingan antara Jumlah Penduduk Miskin dengan PDRB Jawa Barat dari Tahun 2012-2017 berikut ini:

Grafik Perbandingan Jumlah Pertumbuhan Penduduk Miskin dengan Pertumbuhan PDRB di Jawa Barat Tahun 2012-2017

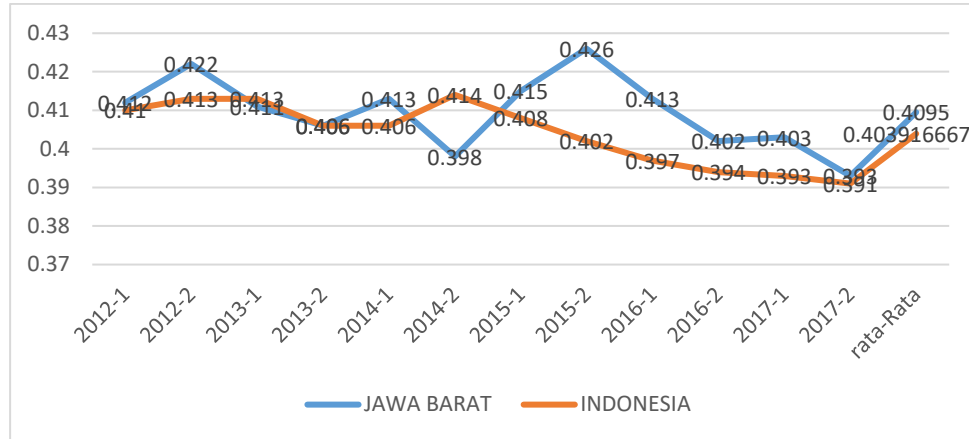


Sumber: BPS (2017)

Berdasarkan Grafik di atas dapat diketahui bahwa justru penurunan PDRB menyebabkan penurunan juga terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Barat. Hal ini terjadi pada tahun 2012-2014 dan 2016-2017, dan kenaikan PDRB dari tahun 2014-2015 justru menyebabkan kenaikan pertumbuhan jumlah penduduk miskin di Jawa Barat.

Perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis dan peneliti sebelumnya lebih diakibatkan adanya ketimpangan pemerataan pendapatan yang terjadi di Jawa Barat pada tahun 2013-2017. Artinya dampak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Hal ini didasarkan pada data gini rasio yang diperoleh dari BPS (2017). Perbandingan data gini rasio Jawa Barat dengan gini rasio Indonesia ditampilkan dengan grafik sebagai berikut:

Grafik Gini Rasio Jawa Barat VS Indonesia Tahun 2012-2017



Sumber : BPS (2017)

Grafik tersebut menggambarkan bahwa hampir keseluruhan gini rasio Jawa Barat selalu diatas gini rasio Indonesia kecuali pada tahun 2014 pada semester 2, gini rasio Jawa Barat sebesar 0,398 terpaut sedikit dengan gini rasio Indonesia sebesar 0,414.

2. Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Jawa Barat Tahun 2013-2017

Pada Tabel 4.8 di atas diketahui bahwa nilai koefisien dari APM adalah - 0.858194 dengan probabilitas $0.0000 < 0.05$. Dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa APM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Apabila APM naik sebesar 1 persen, maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 0.082942 ribu jiwa atau sebesar 82.94 jiwa. Sehingga peningkatan APM berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan di Jawa Barat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Made & Ida Bagus (2013) dan I Made Tony Wirawan & Sudarsana Arka (2017) yang dalam penelitiannya

menunjukkan bahwa meningkatnya variabel pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan Simmons (dalam Todaro, 1994) yang menyatakan bahwa dengan adanya pendidikan diharapkan mampu memberikan pekerjaan yang layak, sehingga pendapatan individu juga akan mengalami peningkatan. Artinya tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat kemiskinan di suatu daerah.

Hal ini juga sesuai dengan teori pertumbuhan baru yang menekankan pentingnya peranan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*). Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Dengan meningkatnya produktivitas tersebut, akan mendorong meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan.

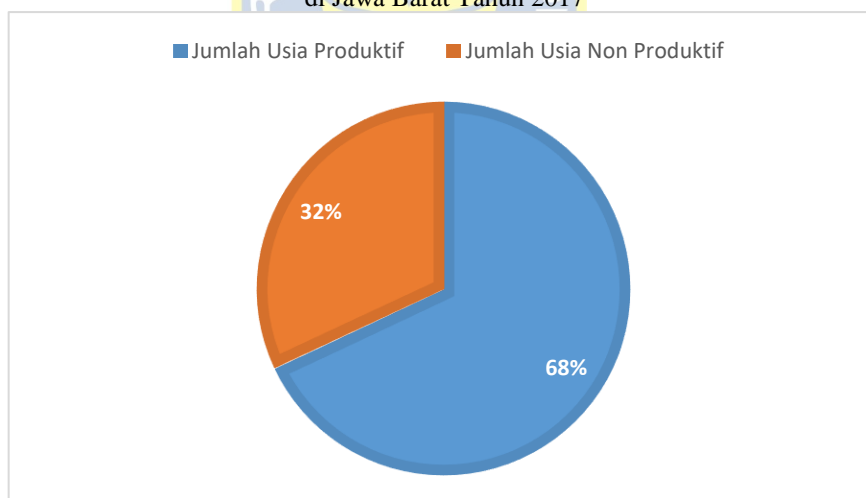
3. Pertumbuhan Jumlah Penduduk Tidak Berpengaruh secara Positif dan Signifikan terhadap Kemiskinan di Jawa Barat Tahun 2013-2017

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat dengan probabilitas $0.2615 > 0.05$. dapat diartikan bahwa semakin besar jumlah penduduk di Jawa Barat pada Tahun 2013-2017 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang

dilakukan oleh Dumairy dalam Kumalasari (2011) yang mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan terhambatnya pembangunan dan kesejahteraan umat. Dikatakan sebagai penghambat pembangunan karena menurut Model Malthusian dalam Mankiw (2006) bahwa dengan adanya penambahan populasi maka sumber daya alam akan semakin berkurang.

Ketidak sesuaian penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya lebih dikarenakan jumlah penduduk di Jawa Barat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2018) mengenai jumlah penduduk usia produktif (usia antara 15-64 tahun) dan non produktif (usia antara 0-14 tahun dan > 65 tahun) pada tahun 2018 digambarkan dalam gambar diagram lingkaran sebagai berikut:

Diagram Lingkaran Prosentase Jumlah Usia Produktif dan Non Produktif di Jawa Barat Tahun 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik (2018)

Diagram lingkaran tersebut merupakan gambaran bahwa jumlah penduduk Non produktif hanya sebesar 32%, lebih kecil bila dibandingkan dengan penduduk usia produktif. Artinya pada saat ini provinsi Jawa Barat sedang mengalami bonus demografi. Sehingga justru dengan jumlah penduduk yang

besar menyebabkan produktivitas masyarakatnya juga semakin naik sehingga kemiskinan semakin turun. Dengan kata lain, bahwa populasi merupakan salah satu sumber yang vital dalam penggerak perekonomian suatu wilayah. Diakatakan demikian, karena dengan populasi penduduk yang besar memperbesar pula jumlah tenaga kerja, memperbesar sehingga dapat memberikan dampak terhadap output atau produksi agregat yang lebih tinggi yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang berarti tingkat kemiskinan akan turun. Hal ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sukirno dalam Mahsunah (2013), dimana penduduk merupakan salah satu modal yang dapat dipergunakan sebagai alat pemicu pembangunan karena dengan adanya pertambahan jumlah penduduk maka semakin tinggi pula pasokkan tenaga kerja serta semakin luas pula pasar yang tersedia. Hal itu dikarenakan pendapatan dan jumlah penduduk merupakan pasar yang potensial. Dengan demikian, dengan semakin besarnya jumlah penduduk maka luas pasar akan bertambah pula.

4. Kesehatan Berpengaruh Secara Positif dan Signifikan terhadap Kemiskinan di Jawa Barat Tahun 2013-2017

Pada Tabel 4.8 di atas diketahui bahwa nilai koefisien dari AHH sebesar + 13.15803 dengan probabilitas 0.0313. Dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa AHH berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Apabila AHH naik sebesar 1%, maka tingkat kemiskinan akan naik sebesar 13.15803 persen. Sehingga peningkatan AHH justru berdampak pada bertambahnya kemiskinan di Jawa Barat.

Penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Anggit Yoga Permana (2012) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kesehatan yang dilihat dari angka harapan hidup mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dikatakan demikian karena variabel kesehatan merupakan salah satu variabel dalam pendukung ekonomi sebagai salah satu faktor produksi yang dapat mempengaruhi nilai tambah dari barang dan jasa. Dapat dikatakan bahwa variabel kesehatan merupakan salah satu bentuk tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bermuara pada kesejahteraan. Dengan kata lain, variabel kesehatan merupakan salah satu investasi dengan tingkat pengembalian yang positif. Hal ini memberikan arti bahwa penduduk Jawa Barat pada rentang usia manula justru memiliki tingkat kemapanan ekonomi yang rendah. Artinya kemampuan masyarakat usia manula di Provinsi Jawa Barat dalam memenuhi kebutuhan dasar masih dikategorikan rendah. Fenomena ini tentunya dapat dimaklumi, karena pada usia manula, tingkat produktivitas masyarakat juga akan menurun. Pada usia manula masyarakat sudah tidak bekerja lagi (PNS biasanya 58 tahun) dan hanya mengandalkan dari uang pensiun (Bagi Pegawai Negeri atau Pegawai Swasta) atau hanya mengandalkan pemasukkan dari anak-anak atau kerabat terdekat (Bagi Masyarakat yang berstatus bukan pegawai), atau masih bekerja namun dengan tingkat produktivitas yang rendah.

Penelitian yang dilakukan penulis dapat diartikan pula bahwa Peningkatan Kesehatan yang terjadi di Jawa Barat pada Tahun 2013-2017 berdampak pada peningkatan jumlah penduduk yang ada di Jawa Barat. Hal ini dapat diketahui

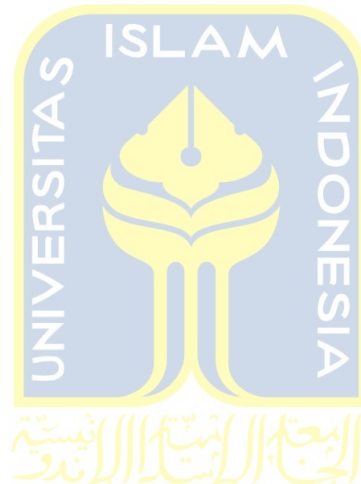
dari grafik perbandingan jumlah penduduk di Jawa Barat tahun 2013-2017 dengan AHH di Jawa Barat tahun 2013-2017 berikut ini:

Perbandingan Rata-Rata AHH dengan Jumlah Penduduk Jawa Barat Tahun 2013-2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Rata-Rata AHH	72,09	72,23	72,41	72,44	72,47
Jumlah Penduduk	45340812	46029668	46709569	47379389	48037612

Sumber: BPS (2018) diolah

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa Angka Harapan Hidup di Jawa Barat dari Tahun 2013-2017 yang terus meningkat, diiringi pula jumlah penduduk yang terus meningkat.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada bab IV maka, dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PDRB tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2013-2017. Berdasarkan hasil perhitungan uji t yang dilakukan diperoleh Nilai Koefisien + 0.000171 dan probabilitas $0.2534 > 0.05$
2. Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2013-2017. Berdasarkan hasil perhitungan uji t yang dilakukan diperoleh nilai koefisien dari APM sebesar -0.858194 dengan probabilitas $0.0000 < 0.05$
3. Pertumbuhan jumlah penduduk tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat Tahun 2013-2017. Berdasarkan hasil perhitungan uji t yang dilakukan diperoleh nilai koefisien +9.38E-07 dan nilai probabilitas $0.2615 > 0.05$
4. Kesehatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat Tahun 2013-2017 Berdasarkan hasil perhitungan uji t yang dilakukan diperoleh nilai koefisien dari AHH sebesar + 13.15803 dengan probabilitas 0.0313
5. Nilai probabilitas pada Uji F adalah $0.000000 < 0,05$, dengan demikian H_0 ditolak. Artinya, variabel laju PDRB, APM, pertumbuhan penduduk,

dan AHH secara simultan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Barat pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$).

5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan tersebut, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Bagi pemerintah provinsi Jawa Barat sebaiknya:

- a. Pembangunan di Provinsi Jawa barat sebaiknya dilakukan secara merata, agar seluruh masyarakat dapat merasakan dampak dari pembangunan tersebut, sehingga kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dapat ditekan.
- b. Akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin di Provinsi Jawa Barat sebaiknya diperluas sehingga secara tidak langsung kemiskinan dapat ditekan dengan masyarakat Jawa Barat yang memperoleh akses pendidikan tinggi.
- c. Peningkatan keterampilan masyarakat Jawa Barat khususnya pada usia produktif sebaiknya senantiasa dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat dengan adanya pelatihan-pelatihan baik yang dilakukan secara mandiri oleh pemerintah melalui BLK (Balai Latihan Kerja) maupun kerjasama dengan sector swasta sehingga masyarakat tidak selalu mencari pekerjaan, namun menciptakan lapangan pekerjaan
- d. Masyarakat sebaiknya diberikan edukasi terhadap pentingnya investasi jangka panjang, sehingga ketika pada usia pension masyarakat Jawa Barat masih dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya:

- a. Memperluas rentang tahun minimal 10 tahun terakhir agar data yang diperoleh menjadi lebih beragam
- b. Dalam mengetahui pengaruh kesehatan terhadap kemiskinan sebaiknya tidak hanya melihat dari Angka Harapan Hidup Melainkan juga Angka Kematian Bayi



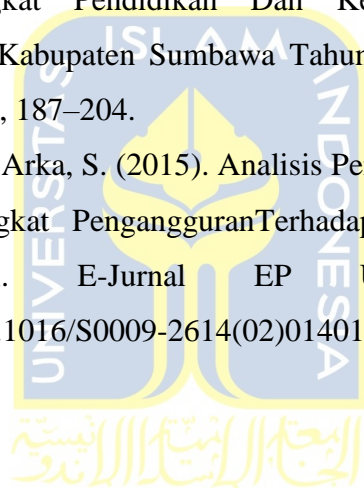
DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, Dini. (2015). Pengaruh Partisipasi Pendidikan terhadap Persentase Penduduk Miskin. *Jurnal Ilmiah Kependidikan Universitas Indraprasta PGRI*. Vol. 2 No. 3.
- Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Astrini A, Ni Made Myanti., & Purbadharmaja, Ida Bagus Putu. (2013). Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. 2 [8] :384-392. ISSN: 2303-0178.
- Astuti, Restu Ratri. (2015). *Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2004-2012*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (2018). *Provinsi Jawa Barat Dalam Angka*. Jawa Barat: BPS Jabar.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dewanto, Awan S. (1995). *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Hermanto S. dan Dwi W. (2006). *Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Penduduk Miskin di Indonesia: Proses Pemerataan dan Pemiskinan*. Bogor: Direktur Kajian Ekonomi IPB.
- Jhingan, M.L. (2007). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (D. Guritno, S.H. Penerjemah). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kumalasari, Merna. (2011). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita, dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah*. Semarang: Skripsi Universitas Diponegoro.
- Kuncoro, Mudrajad. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- Kuncoro, Mudrajad. (2010). *Ekonomika Pembangunan: Masalah, Kebijakan, dan Politik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Martono, Nanang. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Permana, Anggit Yoga. (2012). *Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009*. Semarang: Skripsi Universitas Diponegoro.
- Rahmawati, Kurnia Dwi. (2017). *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di DIY Periode 2006-2013*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Rasyid, Mohtar. (2016). *Pengantar Mikro Ekonometrika dengan Aplikasi Program Stata*. Yogyakarta: Penerbit TREND.
- Saputra, Whisnu Adhi. (2011). *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Semarang: Skripsi Universitas Diponegoro.
- Setiawan,. & Kusriani, Dwi Endah. (2010). *Ekonometrika*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sitepu, Rasidin, dan Bonar M. Sinaga. (2005). *Dampak Investasi Sumber Daya Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia*. Bali: Jurnal Universitas Udayana.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Sukmaraga, Prima. (2011). *Analisis Pengaruh IPM, PDRB Per Kapita, dan Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: Skripsi Universitas Diponegoro.

- Suryosubroto. (2010). *Beberapa Aspek Dasar-dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susanti, Sussy. (2013). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat. *Jurnal Matematika Integratif STIE Ekuitas*. Vol. 9 No. 1, April 2013 pp. 1-18 ISSN 1412-6184.
- Syahrullah, Dio. (2014). *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2009-2012*. Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Tambunan, Tulus Tahi H. (2008). *Pembangunan Ekonomi dan Utang Luar Negeri*. Jakarta: Rajawali.
- Tarigan, Robinson. (2008). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Telasari, Melistika Indriana. (2017). *Analisis Determinan Kemiskinan di Indonesia*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Indonesia.
- Todaro, Michael P., & Stephen C. Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Wibisono, Radityo Yudi. (2015). *Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, dan Pendidikan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2008-2013*. Semarang: Skripsi Universitas Diponegoro.
- Widarjono, Agus. (2009). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Widyarworo, Radhitya. (2014). *Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, dan Angkatan Kerja Wanita terhadap Kemiskinan di Kabupaten Gresik Tahun 2008-2012*. Malang: Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Wijayanto, Ravi D. (2010). *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, Dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2005 – 2008*. Semarang: Skripsi Universitas Diponegoro.

- Duwila, U. (2016). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). *Cita Ekonomika*, X(1), ISSN: 1978-3612.
- Pattimahu, T. V. (2016). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Maluku. *Cita Ekonomi*, X(1), ISSN: 1978-3612.
- Permana, A. Y., dan Arianti, F. (2012). Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009. *Jurnal IESP Fakultas Ekonomika Dan Bisnis*, 1(1), 1–12.
- Suprianto, Pamungkas, B. D., dan Zikriana, J. (2017). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 187–204.
- Wirawan, I. M. T., dan Arka, S. (2015). Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB Per Kapita dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 4(5), 546–560. [https://doi.org/10.1016/S0009-2614\(02\)01401-X](https://doi.org/10.1016/S0009-2614(02)01401-X)



LAMPIRAN

Output Pooled Least Square (PLS)

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/17/18 Time: 03:17
 Sample: 2013 2017
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 27
 Total panel (balanced) observations: 135

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1107.923	367.6324	3.013671	0.0031
X1	0.000514	0.000152	3.374198	0.0010
X2	-2.466071	0.604039	-4.082637	0.0001
X3	3.56E-05	6.36E-06	5.593151	0.0000
X4	-12.53113	5.449273	-2.299596	0.0231
R-squared	0.574458	Mean dependent var		158.8344
Adjusted R-squared	0.561364	S.D. dependent var		108.8242
S.E. of regression	72.07385	Akaike info criterion		11.42959
Sum squared resid	675303.2	Schwarz criterion		11.53720
Log likelihood	-766.4976	Hannan-Quinn criter.		11.47332
F-statistic	43.87311	Durbin-Watson stat		0.561328
Prob(F-statistic)	0.000000			

Output Fixed Effect Model (FEM)

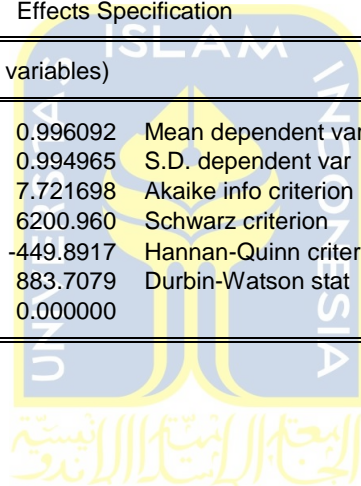
Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/17/18 Time: 03:18
 Sample: 2013 2017
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 27
 Total panel (balanced) observations: 135

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-746.9207	424.3294	-1.760238	0.0813
X1	0.000171	0.000149	1.148435	0.2534
X2	-0.858194	0.195259	-4.395168	0.0000
X3	9.38E-07	8.31E-07	1.128921	0.2615
X4	13.15803	6.026563	2.183339	0.0313

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.996092	Mean dependent var	158.8344
Adjusted R-squared	0.994965	S.D. dependent var	108.8242
S.E. of regression	7.721698	Akaike info criterion	7.124321
Sum squared resid	6200.960	Schwarz criterion	7.791458
Log likelihood	-449.8917	Hannan-Quinn criter.	7.395427
F-statistic	883.7079	Durbin-Watson stat	1.627946
Prob(F-statistic)	0.000000		



Output Random Effect Model (REM)

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	431.612030	(26,104)	0.0000
Cross-section Chi-square	633.211782	26	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 12/17/18 Time: 03:18

Sample: 2013 2017

Periods included: 5

Cross-sections included: 27

Total panel (balanced) observations: 135

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1107.923	367.6324	3.013671	0.0031
X1	0.000514	0.000152	3.374198	0.0010
X2	-2.466071	0.604039	-4.082637	0.0001
X3	3.56E-05	6.36E-06	5.593151	0.0000
X4	-12.53113	5.449273	-2.299596	0.0231
R-squared	0.574458	Mean dependent var		158.8344
Adjusted R-squared	0.561364	S.D. dependent var		108.8242
S.E. of regression	72.07385	Akaike info criterion		11.42959
Sum squared resid	675303.2	Schwarz criterion		11.53720
Log likelihood	-766.4976	Hannan-Quinn criter.		11.47332
F-statistic	43.87311	Durbin-Watson stat		0.561328
Prob(F-statistic)	0.000000			

Chow Test

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 12/17/18 Time: 03:19
 Sample: 2013 2017
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 27
 Total panel (balanced) observations: 135
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	86.81392	311.6136	0.278595	0.7810
X1	0.000446	0.000115	3.877921	0.0002
X2	-0.804060	0.159225	-5.049849	0.0000
X3	1.35E-06	8.22E-07	1.647378	0.1019
X4	1.273734	4.434846	0.287211	0.7744

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		47.49738	0.9743
Idiosyncratic random		7.721698	0.0257

Weighted Statistics			
R-squared	0.184563	Mean dependent var	11.51749
Adjusted R-squared	0.159473	S.D. dependent var	10.98907
S.E. of regression	10.07481	Sum squared resid	13195.23
F-statistic	7.355950	Durbin-Watson stat	0.854727
Prob(F-statistic)	0.000023		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.225035	Mean dependent var	158.8344
Sum squared resid	1229810.	Durbin-Watson stat	0.009171

Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	95.305071	4	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	0.000171	0.000446	0.000000	0.0037
X2	-0.858194	-0.804060	0.012773	0.6320
X3	0.000001	0.000001	0.000000	0.0010
X4	13.158032	1.273734	16.651608	0.0036

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 12/17/18 Time: 03:19

Sample: 2013 2017

Periods included: 5

Cross-sections included: 27

Total panel (balanced) observations: 135

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-746.9207	424.3294	-1.760238	0.0813
X1	0.000171	0.000149	1.148435	0.2534
X2	-0.858194	0.195259	-4.395168	0.0000
X3	9.38E-07	8.31E-07	1.128921	0.2615
X4	13.15803	6.026563	2.183339	0.0313

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.996092	Mean dependent var	158.8344
Adjusted R-squared	0.994965	S.D. dependent var	108.8242
S.E. of regression	7.721698	Akaike info criterion	7.124321
Sum squared resid	6200.960	Schwarz criterion	7.791458
Log likelihood	-449.8917	Hannan-Quinn criter.	7.395427
F-statistic	883.7079	Durbin-Watson stat	1.627946
Prob(F-statistic)	0.000000		